

KETIMPANGAN SPASIAL DAN AGLOMERASI PADA KORIDOR
PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2009-2013.

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM
MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN



DIAJUKAN OLEH
HARDIAN FEBRIANANTA
NIM: 040811201

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016

SKRIPSI

PENGARUH NILAI TUKAR, EKSPOR DAN UPAH MINIMUM
TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA

DIAJUKAN OLEH:
HARDIAN FEBRIANANTA
NIM: 040811201

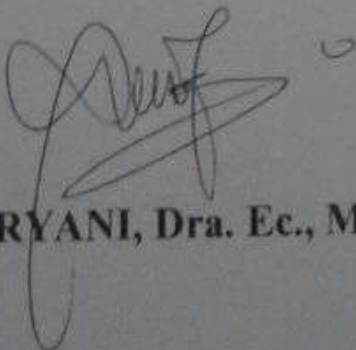
TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:
DOSEN PEMBIMBING,



Dr. NURUL ISTIFADAH, SE., M.Si

TANGGAL 12-08-2016

KETUA DEPARTEMEN ILMU EKONOMI



Dr. MURYANI, Dra. Ec., M.Si., MEMD.

TANGGAL 12-08-2016

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, (Hardian Febriananta, 040811201), menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar – benar hasil karya sendiri dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarisme) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi – sanksi lainnya sesuai dengan norma peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, ... 22 Mei 2016



Hardian Febriananta
NIM. 040811201

DECLARATION

I, (Hardian Febriananta, 040811201), declare that :

1. My thesis is genuine and truly my own creation, and it's not another's person work made under my name, nor a piracy or plagiarism. This thesis has never been submitted to obtain an academic degree in Airlangga University or in any other universities/colleges.
2. This thesis does not contain anywork or opinion written or published by anyone, unless clearly acknowledge or referred to by quoting the author's name and stated in the references.
3. This statement is true, if on the future this statement is proven to be fraud and dishonest, I agree to receive an academic sanction in the form of removal of the degree obtained through this thesis, and other sanction in accordance with the prevailing norms and regulation in Airlangga University.

Surabaya, 22 MAY 2016



Hardian Febriananta
NIM. 040811201

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT yang Maha Besar, Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan ridho, hidayah serta innayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Ketimpangan Spasial dan Aglomerasi pada Koridor Pembangunan di Jawa Timur”**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Rasulullah SAW serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya..

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir selama masa perkuliahan dan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memeproleh gelar Sarjana Ekonomi Departemen Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis bantuan, bimbingan, pengarahan serta dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orangtua penulis, Taufikur Rachman dan Ana Ningsih tercinta atas segala doa, dukungan lahir dan batin yang tidak akan bisa terbalas.
2. Prof. Dr. Dian Agustia, SE., M.Sc.Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
3. Dr. Rudi Purwono, S.E., M.SE, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

4. Dr. Muryani, SE., M.Si.,MEMD, selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga
5. Achmad Sjafi'i, S.E., M.E., Ph.D, selaku dosen wali
6. Ni Made Sukartini, S.E., M.Si., MIDEK selaku Ketua Program Studi S-1 Ekonomi Pembangunan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
7. Rossanto Dwi Handoyono, SE.,M.Si.Ph.D, selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
8. Dr. Nurul Istifadah, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing, yang telah rela meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran.
9. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, khususnya staf pengajar Program Studi Ekonomi Pembangunan Departemen Ilmu Ekonomi, terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang telah diberikan.
10. Seluruh staf Prodi Ilmu Ekonomi, mbak Nuning dan mas Ifan terima kasih atas bantuan administrasinya.
11. Seluruh staf akademik yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Teman-teman staf dinas sosial terutama untuk Cyntia yang telah membantu pekerjaan penulis selama penulis sibuk menyelesaikan skripsi ,
Terima kasih atas semangat dan dukungannya

13. Teman- teman Ekonomi Pembangunan angkatan 2008-2012 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa isi dan cara penyajian skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran sangat penulis harapkan guna meningkatkan mutu dari penulisan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Surabaya,

Penulis

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN

DAFTAR NO. :

ABSTRAK

SKRIPSI SARJANA EKONOMI

NAMA : Hardian Febriananta

NIM : 040811201

TAHUN PENYUSUNAN : 2015 - 2016

JUDUL:

Ketimpangan Spasial Dan Aglomerasi Pada Koridor Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

ISI:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, baik ketimpangan spasial yang terjadi antar kabupaten/kota, ketimpangan spasial yang terjadi antar koridor pembangunan di Jawa Timur, dan tingkat aglomerasi yang terjadi pada setiap koridor pembangunan di Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan periode penelitian tahun 2009-2013. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari BPS provinsi Jawa Timur, berbagai laporan penelitian, dan jurnal-jurnal yang mendukung penelitian ini. Teknik analisis menggunakan indeks entropi Theil dan Index Williamson untuk analisis ketimpangan dan indeks Krugman dan indeks Herfindahl untuk analisis aglomerasi. Hasil penelitian berdasarkan perhitungan menggunakan indeks theil dan Indeks Williamson menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh oleh setiap daerah dalam masing-masing koridor di wilayah Jawa Timur tidak memiliki ketimpangan yang signifikan, sedangkan hasil perhitungan nilai Indeks Krugman dan Indeks Herfindahl menunjukkan bahwa diantara koridor di Jawa Timur tidak terjadi aglomerasi atau pemusatan aktivitas perekonomian di Jawa Timur.

KATA KUNCI:

Ketimpangan spasial, tingkat aglomerasi, koridor pembangunan

DAERAH PENELITIAN:

Jawa Timur

MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION

FACULTY OF ECONOMIC AND BUSINESS AIRLANGGA UNIVERSITY

STUDY PROGRAMME : DEVELOPMENT ECONOMIC

LIST NO. :

ABSTRACT

THESIS GRADUATE ECONOMICS

NAME : Hardian Febriananta

NIM : 040811201

COMPILATION OF : 2015-2016

TITLE:

Spatial Inequalities And Agglomeration In Corridor Development In East Java Province 2009-2013

CONTENTS:

The research aims to analysis disparity in the East Java province, that is spatial disparity occur between districts/cities and spatial disparity occurred between development corridors in East Java, and the level of agglomeration that occurs in every corridor development area in Java East. This research used quantitative method with a reserach period from 2009 to 2013. The research datais secondary data obtained fromBPS province of East Java, such as research reports, and journals that support this research. Analysis techniques used in this research using entrophil Theil index and Williamson index for the analysis of disparity and Krugman index and Herfindahl index for the analysis of agglomeration. The research results based oncalculationsusing the theil Index and Williamson Index show that that East Javarevenue earned by each region in each corridors in East Java area didn't have a significant gap, while theresults of Krugman Index Value and Herfindahl Index show that among the corridors in East Java didn't occur agglomeration or concentration of activity economy in East Java.

KEY WORDS:

Spatial disparity, agglomeration level, and development corridors

RESEARCH AREA:

East Java

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengesahan Skripsi | ii |
| Halaman Persetujuan Skripsi..... | iii |
| Halaman Pernyataan Orisinalitas skripsi | iv |
| <i>Declaration</i> | v |
| Kata Pengantar..... | vi |
| Abstrak | ix |
| <i>Abstract</i> | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan masalah..... | 13 |
| 1.3. Tujuan penelitian..... | 13 |
| 1.4. Manfaat penelitian..... | 14 |
| | |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 15 |
| 2.1. Landasan teori..... | 15 |
| 2.1.1. Pengertian Distribusi Pendapatan..... | 15 |
| 2.1.2. Ukuran Distribusi Pendapatan | 18 |
| 2.1.3. Penyebab Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan | 20 |
| 2.1.4. Pembangunan Ekonomi | 22 |
| 2.1.4.1. Teori Pembangunan Ekonomi | 22 |
| 2.1.4.2. Teori Neoklasik..... | 23 |

| | |
|---|-----------|
| 2.1.5. Pengaruh Ketimpangan Spasial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi..... | 24 |
| 2.1.6. Teori Aglomerasi..... | 27 |
| 2.1.6.1. Keuntungan Aglomerasi..... | 30 |
| 2.2. Kajian Penelitian Terdahulu | 31 |
| 2.3. Kerangka Berfikir..... | 37 |
| BAB 3. METODE PENELITIAN | 40 |
| 3.1. Pendekatan penelitian | 40 |
| 3.2. Definisi operasional..... | 41 |
| 3.3. Jenis dan sumber data | 43 |
| 3.4. Prosedur pengumpulan data | 43 |
| 3.5. Teknik analisis | 44 |
| 3.5.1. Metode Pengukuran Ketimpangan..... | 44 |
| 3.5.1.1. Indeks Theil..... | 44 |
| 3.5.1.2. Indeks Williamson | 46 |
| 3.5.2. Metode Pengukuran Aglomerasi..... | 47 |
| 3.5.2.1. Indeks Krugman..... | 47 |
| 3.5.2.2. Indeks Herfindahl..... | 48 |
| BAB 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... | 49 |
| 4.1. Kondisi Geografis dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur..... | 49 |
| 4.1.1. Perekonomian Jawa Timur..... | 54 |
| 4.2. Hasil Analisis..... | 58 |
| 4.2.1. Analisis Indeks Theil | 58 |
| 4.2.2. Analisis Indeks Williamson | 61 |
| 4.2.3. Analisis Indeks Krugman..... | 62 |
| 4.2.4. Analisis Indeks Herfindahl | 64 |
| 4.3. Pembahasan..... | 65 |

| | |
|--|----|
| 4.3.1. Tingkat Ketimpangan Spasial Antara Kabupaten/Kota Dalam Setiap Koridor Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur | 65 |
| 4.3.2. Tingkat Ketimpangan Spasial Yang Terjadi Antar Koridor Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur | 71 |
| 4.3.3. Tingkat Aglomerasi Di Setiap Koridor Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur..... | 75 |
| BAB 5. PENUTUP | 81 |
| 5.1. Simpulan | 81 |
| 5.2. Saran | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Menurut Provinsi Tahun 2010-2013..... | 5 |
| 1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013 | 6 |
| 4.1 Indeks Theil Untuk Ketimpangan Antar Kota/Kabupaten Dalam Satu Koridor | 59 |
| 4.2 Indeks Theil Untuk Ketimpangan Antar Koridor..... | 60 |
| 4.3 Indeks Willamson Per Koridor di Jawa Timur 2009-2013 | 61 |
| 4.4 Indeks Krugman Per Koridor di Jawa Timur 2009-2013 | 63 |
| 4.5 Indeks Herfindahl Per Koridor di Jawa Timur 2009-2013 | 64 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| 2.1 Kerangka Pemikiran..... | 38 |
| 4.1 Pertumbuhan Jumlah penduduk Jawa Timur Tahun 2009-2013 | 51 |
| 4.2 LajuPertumbuhan PDRB ADHK 2000 | 55 |
| 4.3 LajuPertumbuhan PDRB Per Kapita..... | 56 |
| 4.4 PDRB JawaTimur 2009-2013 (Milyar Rupiah) | 57 |
| 4.5 Tingkat Ketimpangan Spasial Antara Kabupaten/Kota Dalam Setiap Koridor Pembangunan Di ProvinsiJawaTimur..... | 67 |
| 4.6 Tingkat Ketimpangan Spasial Yang Terjadi AntarKoridor Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur..... | 73 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada umumnya setiap negara di dunia memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya melalui peningkatan pembangunan ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada.

Pembangunan ekonomi bukan hanya bertujuan dalam hal menciptakan modernisasi masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat tersebut. Pembangunan ekonomi yang ada diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata. Tujuan pembangunan ekonomi tidak akan tercapai apabila pembangunan ekonomi mengakibatkan distribusi pendapatan masyarakat menjadi semakin memburuk keadaannya. Dalam keadaan seperti ini hanya segolongan kecil saja dari keseluruhan anggota masyarakat yang menikmati hasil pembangunan (Sadono dalam Rubiarko, 2013). Hal ini berarti muncul dampak ketimpangan dalam pelaksanaan proses pembangunan yang dilaksanakan.

Ketimpangan yang paling lazim dibicarakan adalah ketimpangan ekonomi, dimana indikator ketimpangan ekonomi yang sering digunakan adalah perbedaan

pendapatan per kapita, tingkat pendapatan antar kelompok dan tingkat pendapatan antar wilayah. Pendapatan per kapita suatu daerah dapat dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Cara lain yang bisa digunakan untuk mengukur ketimpangan spasial adalah dengan mendasarkan kepada pendapatan personal yang dihitung melalui pendekatan konsumsi (Widiarto, 2001). Untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi spasial salah satunya menggunakan Indeks Theil.

Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar dan hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia yang tercantum dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yaitu, pelaksanaan pembangunan di samping untuk meningkatkan pendapatan nasional sekaligus juga harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat.

Adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan spasial dan menjadi tantangan untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi di Indonesia. Adanya ketimpangan dalam pembagian pendapatan antara berbagai daerah pada suatu wilayah akan menyebabkan ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro dalam Iswanto, 2015).

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi merupakan dua tujuan pembangunan yang seharusnya dapat dicapai secara bersamaan dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti oleh pemerataan ekonomi akan memperbesar kesenjangan antara kelompok masyarakat. Sementara pemerataan ekonomi tanpa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan angka kemiskinan suatu daerah. Pertumbuhan dan pemerataan di dalam suatu wilayah terutama berkaitan dengan distribusi pendapatan, merupakan hal terpenting untuk diperhatikan oleh negara berkembang. Keduanya (pertumbuhan dan pemerataan) sama-sama penting, namun cenderung sulit diwujudkan dalam waktu yang bersamaan. Pengutamaan antara pertumbuhan akan menuntut dikorbankannya pemerataan, begitu pula sebaliknya.

Peningkatan kesejahteraan dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang cepat setiap tahunnya. Dengan kata lain, suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti. Dikatakan mengalami pertumbuhan yang lambat apabila dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau fluktuatif (Sukino,1985:58)

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah dapat diketahui dengan meninjau pertumbuhan PDRB. Meskipun PDRB tidak serta merta mampu menggambarkan kesejahteraan yang nyata pada tiap penduduk di dalamnya. Maka untuk

mengukurnya menggunakan PDRB per kapita daerah, sebab alat ini merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah, di mana jika semakin besar PDRB per kapitanya maka dapat diartikan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Suatu masyarakat yang memiliki kesejahteraan yang baik, maka pertumbuhan ekonominya pun juga baik (Iswanto, 2015). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian.

Pelaksanaan pembangunan merupakan alat untuk menurunkan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Selama pertumbuhan ekonomi dan hasil dari pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, maka masalah ketidakmerataan distribusi pendapatan tidak akan muncul. Jika kinerja ekonominya lebih baik atau mengalami kemajuan maka seluruh rakyat juga harus merasakan dampak kemajuan tersebut dalam bentuk naiknya tingkat pendapatan.

Pelaksanaan pembangunan di Indonesia dilihat dari aspek spasial menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Jawa pada umumnya mengalami perkembangan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan provinsi lainnya di luar Jawa. Perbedaan perkembangan antar daerah tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan dan kemajuan antar daerah, terutama antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan Jawa dan luar Jawa pada khususnya.

Hal ini menunjukkan bahwa walaupun perekonomian provinsi-provinsi di wilayah Kawasan Timur Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi

tingkat ketimpangan antara wilayah KBI dan KTI relatif masih sangat tinggi. Ketimpangan tersebut berdampak pada ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di antara daerah-daerah di wilayah KBI dan KTI.

Selain ketimpangan yang terjadi antara wilayah KBI dan KTI, ketidakmerataan juga terjadi antar provinsi di Pulau Jawa, meskipun pulau Jawa merupakan motor penggerak perekonomian di Indonesia. Ketimpangan pembangunan antar provinsi dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan (PDRB per kapita) dan pertumbuhan ekonominya.

Pada table 1.1 melalui 6 (enam) provinsi di pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur adalah yang paling tinggi di antara provinsi lainnya di Jawa dan di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, provinsi DKI Jakarta hanya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi terbesar kedua.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Menurut Provinsi
Tahun 2010-2013

| Provinsi | Pertumbuhan Ekonomi (%) | | | |
|---------------|-------------------------|------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| DKI Jakarta | 6.49 | 6.72 | 7.13 | 7.69 |
| Jawa Barat | 6.08 | 6.11 | 6.99 | 7.25 |
| Jawa Tengah | 5.76 | 5.98 | 6.56 | 7.08 |
| DI Yogyakarta | 5.12 | 5.22 | 5.82 | 6.26 |
| Jawa Timur | 6.22 | 6.61 | 7.20 | 7.82 |
| Banten | 5.93 | 5.97 | 6.27 | 6.82 |

Sumber : BPS Indonesia tahun 2014

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Dalam tahun (2011-2012) terlihat pertumbuhan

pendapatan perkapita penduduk di provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur diukur dari perubahan nilai PDRB riilnya, yaitu PDRB atas dasar harga konstan 2000. Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur memiliki tren yang semakin meningkat. Berikut ini disajikan tabel pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur.

Tabel 1.2
PDRB Per kapita ADHB 2000 dan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Jawa Timur, Tahun 2007 – 2012

| Tahun | Nilai (Ribu Rupiah) | Pertumbuhan (%) |
|--------------|----------------------------|------------------------|
| 2007 | 14.628 | - |
| 2008 | 16.750 | 12,67 |
| 2009 | 18.415 | 9,04 |
| 2010 | 20.703 | 11,05 |
| 2011 | 23.459 | 11,75 |
| 2012 | 26.444 | 11,29 |

Sumber : bappenas.go.id

Berdasarkan data Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa pendapatan per kapita di Jawa Timur mengalami peningkatan cukup besar yang dimulai pada tahun 2008 dengan nilai PDRB per kapita sebesar 16.750.000.000 menjadi 26.444.000.000 pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2008 hingga tahun 2012 telah terlihat adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, adanya pertumbuhan ekonomi ini karena adanya peningkatan pendapatan perkapita yang terjadi di provinsi Jawa Timur. Hal ini juga tidak terlepas dari semakin terbukannya lapangan pekerjaan

yang kemudian dapat menyerap tenaga kerja terbuka. Sehingga, tingkat pengangguran berkurang dan pendapatan perkapita pun juga meningkat (BPS, 2015).

Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Selain pembagian wilayah secara administratif menurut kabupaten/kota, wilayah provinsi Jawa Timur juga dibagi menurut daerah perencanaan, yaitu menjadi beberapa koridor sebagai berikut (Arifin, 2010):

- 1) Koridor Utara Selatan yang terdiri dari Kabupaten Gresik – Kota Surabaya – Kabupaten Sidoarjo – Kota Mojokerto – Kabupaten Mojokerto – Kabupaten Pasuruan – Kota Pasuruan – Kabupaten Malang – Kota Malang – Kota Batu – Kabupaten Blitar – Kota Blitar;
- 2) Koridor Barat Daya yang terdiri dari Kabupaten Jombang – Kabupaten Kediri – Kota Kediri – Kabupaten Tulungagung – Kabupaten Trenggalek – Kabupaten – Kabupaten Nganjuk – Kabupaten Madiun – Kota Madiun – Kabupaten Ponorogo – Kabupaten Pacitan – Kabupaten Magetan;
- 3) Koridor Timur yang terdiri dari Kabupaten Probolinggo – Kota Probolinggo – Kabupaten Situbondo – Kabupaten Bondowoso – Kabupaten Lumajang – Kabupaten Jember – Kabupaten Banyuwangi; dan
- 4) Koridor Utara yang terdiri dari Kabupaten Lamongan – Kabupaten Tuban – Kabupaten Bojonegoro – Kabupaten Ngawi – Kabupaten Bangkalan – Kabupaten Sampang – Kabupaten Pamekasan – Kabupaten Sumenep.

Percepatan pertumbuhan daerah dapat dicapai dengan memacu pusat-pusat pertumbuhan (*growth poles*) yang akan mendorong pertumbuhan daerah-daerah

sekitarnya. Daerah-daerah biasanya sulit untuk berkembang cepat secara bersamaan. Pusat pertumbuhan diperlukan sebagai perangsang bagi pertumbuhan daerah sekitarnya. Penelitian ini menganalisis perbandingan perekonomian pada empat koridor di Provinsi Jawa Timur.

Banyaknya kabupaten/kota yang terdapat di dalam Provinsi Jawa Timur menjadikan provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang berbeda-beda juga dari setiap kabupaten/kota tersebut. Ada yang berpotensi sektor di pertanian, industri, pertambangan, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan pendapatan tiap daerah tidak merata, sehingga timbul ketimpangan antar daerah. Seiring dengan berkembang pesatnya industrialisasi yaitu semakin bertambahnya jumlah industri yang ada di Jawa Timur maka akan menggeser sektor pertanian, sesuai dengan teori Lewis yang mengatakan bahwa perbedaan tingkat upah antara sektor pertanian dengan sektor industri mendorong perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri.

Sektor industri di Jawa Timur sendiri masih cenderung mengelompok dan tidak menyebar secara merata. Salah satu penyebab dari pengelompokan tersebut diantaranya adalah selain sebagai tempat dengan taraf perekonomiannya yang maju dan merupakan kota besar yang menjadi tempat berkembangnya industri pengolahan, sektor jasa yang sangat berkembang dan juga tempat wisata. Kondisi tersebut juga didukung dengan adanya perbedaan akan sumber daya dan juga infrastruktur yang memang dinyatakan sangat mempengaruhi daerah Jawa Timur (Iswanto, 2015). Pengelompokan sektor industri di Jawa Timur ini dibuktikan dengan adanya pembagian enam kawasan industri di Jawa Timur, yaitu Surabaya

Industrial Estate Rungkut (SIER) di Kota Surabaya, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan, Maspion Industrial Estate (MIE) di Kabupaten Gresik, Ngoro Industrial Park (NIP) di Kabupaten Mojokerto, Sidoarjo Industrial Estate Berbek (SIEB) di Kabupaten Sidoarjo, serta Kawasan Industri Gresik di Kabupaten Gresik, dari enam kawasan tersebut hampir seluruhnya terdapat pada koridor pembangunan utara-selatan saja, hal tersebut juga menunjukkan adanya aglomerasi di provinsi Jawa Timur.

Aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen (Montgomery dalam Kuncoro, 2002:24). Adanya aglomerasi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan di provinsi Jawa Timur.

Nuryadin, dkk. (2007) menjelaskan bahwa adanya aglomerasi menjadikan persebaran sumber daya yang tidak merata sehingga menimbulkan disparitas dalam laju pertumbuhan ekonomi antar daerah. Daerah-daerah yang mengalami konsentrasi kegiatan ekonomi akan memperoleh manfaat yang disebut dengan ekonomi aglomerasi (*agglomeration economies*). Adanya ekonomi aglomerasi ini akan memberikan pengaruh yang positif pada laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini kemudian menjadikan daerah-daerah yang termasuk dalam aglomerasi akan memiliki laju pertumbuhan yang tinggi dibandingkan dengan daerah yang bukan aglomerasi.

Aglomerasi juga akan menghasilkan perbedaan spasial dalam tingkat pendapatan. Semakin teraglomerasi secara spasial suatu perekonomian, maka akan semakin meningkat pertumbuhannya. Daerah-daerah yang banyak industri pengolahan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah-daerah yang memiliki sedikit industri pengolahan. Alasannya adalah daerah-daerah yang memiliki industri pengolahan lebih banyak akan memiliki akumulasi modal. Terjadinya dua kutub konsentrasi kegiatan ekonomi di Jawa secara spasial oleh Kuncoro (2002) dikatakan, bahwa perusahaan manufaktur di Jawa mencari lokasi di daerah yang berpenduduk padat untuk memperoleh penghematan lokalisasi dan urbanisasi, seperti yang ditunjukkan dengan signifikannya variabel skala ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan selanjutnya dikatakan juga bahwa struktur pasar di Jawa mendorong terjadinya konsentrasi secara geografis.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa daerah-daerah dengan konsentrasi industri pengolahan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki konsentrasi industri pengolahan (Nuryadin, dkk, 2007). Tetapi di sisi lain aglomerasi juga menimbulkan dampak negatif yaitu padatnya penduduk di suatu kota karena akibat berpindahnya penduduk desa ke kota (urbanisasi) yang mencari pekerjaan pada sektor industri.

Tilaar (2010) menjelaskan bahwa pada proses perkembangan industri di Indonesia, Jawa Timur merupakan wilayah pertama Indonesia yang mengalami dampak dari revolusi industri. Sejak awal industri modern di Jawa Timur tidak diorientasikan ke arah produksi barang-barang konsumsi, namun diarahkan pada pengolahan hasil pertanian, terutama industri gula dan industri berat. Kondisi ini

kemudian menjadikan wilayah Jawa Timur memiliki pertumbuhan industri yang cukup pesat. Akibat dari Jawa Timur sebagai daerah aglomerasi industri khususnya manufaktur, maka industri manufaktur di Jawa Timur menyumbang sekitar 20% dari nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri manufaktur di Indonesia dan sekitar 25% tenaga kerja yang bekerja di sektor industri manufaktur Indonesia. Dengan demikian, roda perekonomian Jawa Timur mengalami kemajuan yang pesat dibandingkan dengan sebagian wilayah lain di Indonesia.

Terjadinya perkembangan aglomerasi industri yang pesat di Jawa Timur ini karena didukung oleh beberapa faktor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan McMichael (2004) menyebutkan beberapa faktor tersebut antara lain adalah faktor kependudukan, ketenagakerjaan maupun infrastruktur, termasuk di dalamnya infrastruktur sektor telekomunikasi, transportasi dan energi. Selain itu, kerja industri manufaktur di Jawa Timur tidak terlepas dari peranan sektor keuangan dan juga dari dukungan iklim investasi yang baik. Kependudukan dan ketenagakerjaan merupakan determinan dari industri manufaktur. Kondisi kependudukan sangat mempengaruhi *local demand* terhadap *output* industri manufaktur di Jawa Timur, sedangkan kondisi ketenagakerjaan mempengaruhi produktivitas industri manufaktur di Jawa Timur.

Berdasarkan uraian tentang pengaruh aglomerasi industri manufaktur, maka laju angkatan kerja dan tingkat upah terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur menjadi *input* serta dasar pertimbangan bagi pemerintah khususnya di Jawa Timur untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi laju

pertumbuhan ekonomi yang secara rata-rata meningkat namun tidak merata. Kondisi seperti itu akan selalu terjadi karena pembangunan dan dalam lingkup daerah secara spasial tidak akan selalu berlangsung sistemik. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat. Kemajuan daerah yang tidak sama tersebut disebabkan perbedaan sumber-daya yang dimiliki. Kecenderungan peranan para pemodal (investor) yang memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas umum dan infrastruktur seperti sarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, tenaga kerja yang terampil, menyebabkan adanya ketimpangan antar daerah.

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia telah berubah seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah yaitu dengan cara mendekatkan pembuatan keputusan ke daerah. Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah baik untuk mengatur urusan pembangunan ekonominya masing-masing. Pemberlakuan kebijakan otonomi daerah juga berarti Pemerintah Daerah harus memiliki rencana ekonomi daerah yang baik untuk menyediakan kesejahteraan bagi penduduknya. UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan harapan suatu daerah untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri sehingga ketimpangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor secara bertahap dapat diperkecil.

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan analisa lebih lanjut terkait dengan

ketimpangan dan aglomerasi di Jawa Timur. Adapun judul yang kemudian digunakan peneliti adalah Ketimpangan Spasial Dan Aglomerasi Pada Koridor Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat ketimpangan spasial antara kabupaten/kota dalam setiap koridor pembangunan di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana tingkat ketimpangan spasial yang terjadi antar koridor pembangunan di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana tingkat aglomerasi antar koridor pembangunan di Provinsi Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Menganalisa seberapa besar tingkat ketimpangan spasial antara kabupaten/kota dalam koridor pembangunan di Provinsi Jawa Timur pada periode 2009-2013.
2. Menganalisa seberapa besar tingkat ketimpangan spasial yang terjadi antar koridor pembangunan di Provinsi Jawa Timur pada periode 2009-2013.
3. Menganalisa seberapa besar hasil pengukuran aglomerasi di setiap koridor pembangunan di Provinsi Jawa Timur pada periode 2009-2013.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti, sebagai bahan tambahan pengetahuan dan sebagai validasi dalam bidang yang sama.
2. Bagi Masyarakat, secara umum akan dapat menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat.
3. Sebagai bahan pertimbangan para pengambil kebijakan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah untuk menyusun rencana pembangunan di masa yang akan datang dalam rangka mengatasi ketimpangan yang terjadi pada tiap daerah di Provinsi Jawa Timur.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Konsep pengukuran distribusi pendapatan dapat ditunjukkan oleh dua konsep pokok, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Ketimpangan *relative* merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Ahluwalia dalam Sukirno, 1985:89).

Para ahli ekonomi pada umumnya membedakan antara dua ukuran utama dari distribusi pendapatan baik untuk tujuan analisis maupun kuantitatif, yaitu:

1. Distribusi pendapatan perorangan (*personal distribution of income*).

Distribusi pendapatan perorangan memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh individu atau perorangan termasuk pula rumah tangga. Dalam konsep ini, yang diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang tidak dipersoalkan cara yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga yang mencari penghasilan tersebut

berasal dari bekerja atau sumber lainnya seperti bunga, hadiah, keuntungan maupun warisan. Demikian pula tempat dan sektor sumber pendapatanpun turut diabaikan

2. Distribusi pendapatan fungsional

Distribusi pendapatan fungsional mencoba menerangkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh tiap faktor produksi. Faktor produksi tersebut terdiri dari tanah atau sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Pendapatan didistribusikan sesuai dengan fungsinya seperti buruh menerima upah, pemilikan tanah menerima sewa dan pemilik modal menerima bunga serta laba. Jadi setiap faktor produksi memperoleh imbalan sesuai dengan kontribusinya pada produksi nasional, tidak lebih dan tidak kurang.

Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan. Adapun pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan faktor produksi dapat di kelompokkan menjadi dua macam:

1. Pendapatan karena hasil kerja yang berupa upah atau gaji dan besarnya tergantung tingkat produktifitas.
2. Pendapatan dari sumber lain seperti sewa, laba, bunga, hadiah atau warisan.

Sayangnya relevansi teori fungsional tidak mempengaruhi pentingnya peranan dan pengaruh kekuatan di luar pasar (faktor-faktor non-ekonomis) misalnya kekuatan dalam menentukan faktor-faktor harga (Todaro, 2003:75).

Bigsten (1987) dalam Arsyad (1999:302) mengemukakan bahwa distribusi pendapatan pada sebuah perekonomian adalah hasil akhir dari seluruh proses

ekonomi, yang artinya bahwa distribusi pendapatan pada prinsipnya harus memperhitungkan semua faktor yang mempengaruhinya. Ketidakmerataan dalam suatu pembangunan meliputi:

1. Ketidakmerataan Pendapatan Nasional

Distribusi pendapatan antara lapisan pendapatan masyarakat dapat ditelaah dengan mengamati perkembangan angka-angka rasio gini. Namun juga perlu dicatat, bahwa rasio gini bukan merupakan indikator paling ideal tentang ketidakmerataan distribusi pendapatan antar lapisan.

2. Ketidakmerataan Pendapatan Spasial

Ketidakmerataan distribusi pendapatan antar lapisan masyarakat tidak saja berlangsung secara nasional, tetapi juga secara spasial atau antar daerah, yakni antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di Indonesia pembagian pendapatan relatif lebih merata di daerah pedesaan daripada daerah perkotaan. Ketidakmerataan pendapatan yang berlangsung antar daerah tidak hanya dalam hal distribusinya, tapi juga dalam hal tingkat atau besarnya pendapatan itu sendiri.

3. Ketidakmerataan Pendapatan Regional

Secara regional atau antarwilayah, berlangsung pula ketidakmerataan pendapatan antar lapisan masyarakat. Dalam perspektif antar wilayah, ketidakmerataan terjadi baik dalam hal tingkat pendapatan masyarakat antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, maupun dalam hal distribusi pendapatan di kalangan penduduk masing-masing wilayah.

2.1.2. Ukuran Distribusi Pendapatan

Terdapat berbagai kriteria untuk menilai pemerataan (parah atau lunaknya ketimpangan) didistribusi yang dimaksud. Beberapa diantaranya yang paling lazim, yaitu:

1. Indeks Wiliamson

Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan per kapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan per kapita nasional. Jadi, Indeks Williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standard deviasi. Semakin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah semakin besar, dan sebaliknya (Yuliani, 2015). Tingkat ketidaksamaan regional adalah sangat tinggi dalam golongan pendapatan menengah berdasarkan Kuznets, tetapi secara konsisten lebih rendah apabila kita bergerak ke tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Dapat dikatakan juga bahwa pada waktu tingkat perkembangan perekonomian suatu negara masih rendah, maka tingkat kesenjanganpun semakin rendah (nilai Indeks Williamson). Nilai ini terus meningkat bagi negara-negara yang tingkat perkembangan ekonominya semakin tinggi. Sampai suatu saat tercapai titik balik, dimana tingkat perkembangan ekonomi negara makin tinggi, maka nilai indeksnya semakin rendah. Rumus Indeks Williamson :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i/n}}{Y} \quad (1)$$

Keterangan :

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita (dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota)

Y = PDRB per kapita (provinsi)

f_i = Jumlah penduduk (dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota)

n = Jumlah penduduk (provinsi)

Perhitungan Indeks Williamson (IW) berkisar antara $0 < IW < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya daerah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang daerah yang diteliti (Sjafrizal, 2008).

2. Entrophy Theil

Ying dalam Kuncoro (2006:59) menggunakan Indeks Theil untuk menghitung ketimpangan pendapatan antar wilayah. Indeks Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antar daerah. Indeks Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ini juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan digunakan untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ketimpangan spasial. Indeks Entropi Theil (IET) berkisar antara $0 < IET < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang dan sebaliknya. Indeks Entropi Theil dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$T_p = \sum_j \left[\frac{Y_{ij}}{Y} \right] \log \left[\frac{\left(\frac{Y_{ij}}{Y} \right)}{\left(\frac{N_{ij}}{N} \right)} \right] \quad (2)$$

Keterangan:

T_p = Ketimpangan antar kabupaten

Y_{ij} = PDRB per kapita kabupaten i di provinsi j

Y = Jumlah PDRB per kapita seluruh provinsi j

n = Jumlah penduduk kabupaten i di provinsi j

N = Jumlah penduduk seluruh kabupaten

Bila nilai Indeks Entropi Theil= 0 maka pemerataan sempurna dan bila nilai indeks semakin jauh dari 0 (nol) maka ketimpangan yang terjadi besar

2.1.3. Penyebab Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan

Menurut Adelma dan Morris dalam laporan yang disusun oleh Laboratorium Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Padjajaran dan Bappeda Kota Bandung (2015) terdapat 8 hal yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan penambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.

4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*Capital Incentive*), sehingga persentase pendapatan modal dari kerja tambahan besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi Negara Sedang Berkembang dalam perdagangan dengan Negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan Negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor Negara Sedang Berkembang.
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Adelman dan Moris berpendapat bahwa kesenjangan pendapatan di daerah ditentukan oleh jenis pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh ukuran negara, sumber daya alam, dan kebijakan yang dianut. Untuk itu, faktor kebijakan dan dimensi struktural perlu diperhatikan selain laju pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2004:177-178).

Terdapat banyak ulasan yang mencoba menjelaskan mengapa pada tahap-tahap awal distribusi pendapatan cenderung memburuk, untuk kemudian membaik. Sebagian besar dari ulasan tersebut mengaitkannya dengan kondisi dasar perubahan struktural. Tahapan pertumbuhan awal akan terpusat di sector

industri modern (dalam model Lewis), lapangan kerja terbatas, namun tingkat upah dan produktivitas terhitung tinggi. Kesenjangan pendapatan antar sektor industri modern dengan sektor pertanian tradisional pada awalnya melebar dengan cepat sebelum akhirnya menyempit kembali. Ketimpangan dalam sektor modern yang tengah mengalami pertumbuhan pesat jauh lebih besar daripada yang terkandung dalam sektor tradisional yang relatif stagnan (Todaro, 2004:177-178).

2.1.4. Pembangunan Ekonomi

2.1.4.1. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

Bapak ekonomi pembangunan, Adam Smith dalam bukunya yang berjudul "*An Inquiry into the nature and Causes of Wealth of the Nation*" menjelaskan bahwa faktor – faktor yang menimbulkan pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan mendorong tingkat spesialisasi. Adanya spesialisasi akan meningkatkan kegiatan ekonomi atau mempercepat proses pembangunan ekonomi, karena spesialisasi akan mendorong produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi.

Pada intinya prinsip teori klasik tentang pembangunan ekonomi adalah sama dengan teori pasar bebas atau pasar bersaing sempurna seperti yang ditemui dalam ekonomi mikro, dimana campur tangan pemerintah adalah minimal. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dalam pasar bebas bila masyarakat dibiarkan berusaha tanpa intervensi akan menghasilkan kemakmuran bersama

2.1.4.2. Teori Neoklasik

Teori Neoklasik (*Neo-classic Theory*) pertama kali dikemukakan oleh Borts Stein (1964), lalu kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Roman (1965) dan Siebert (1969). Dalam negara yang sedang berkembang, pada saat proses pembangunan baru dimulai, tingkat perbedaan kemakmuran antar wilayah cenderung menjadi tinggi (*divergence*), sedangkan bila proses pembangunan telah berjalan dalam waktu yang lama maka perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung mengalami penurunan (*convergence*).

Hipotesa Neoklasik ini kemudian diuji kebenarannya oleh Jeffrey G. Williamson pada tahun 1996 melalui suatu studi tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang dengan menggunakan data *time series* dan *cross-section*. Hasil pengembangan hipotesa tersebut menunjukkan bahwa hipotesa Neoklasik yang diformulasikan secara teoritis ternyata terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak otomatis dapat menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah, tetapi pada tahap permulaan suatu pembangunan justru terjadi hal sebaliknya.

Hal tersebut disebabkan pada negara sedang berkembang lalu lintas modal masih belum lancar sehingga proses penyesuaian kearah tingkat keseimbangan pertumbuhan belum dapat terjadi. Teori ini mendasarkan analisisnya pada komponen fungsi produksi. Unsur- unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah modal, tenaga kerja, dan teknologi. Adapun kekhususan

teori ini adalah dibahasnya secara mendalam pengaruh perpindahan penduduk (migrasi) dan lalu lintas modal terhadap pertumbuhan regional.

2.1.5. Pengaruh Ketimpangan Spasial Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2003:173), pemerataan yang lebih adil di negara berkembang merupakan suatu kondisi atau syarat yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin timpang distribusi pendapatan di suatu negara akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketimpangan spasial antar daerah, tergantung dari besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penerima pendapatan dalam daerah tersebut, baik itu golongan masyarakat maupun wilayah tertentu dalam daerah tersebut. Perbedaan jumlah pendapatan yang diterima itu menimbulkan suatu distribusi pendapatan yang berbeda, sedangkan besar kecilnya perbedaan tersebut akan menentukan tingkat pemerataan pendapatan (ketimpangan spasial) daerah tersebut. Ketimpangan spasial ini akan tergantung dari besar kecilnya perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh penerima pendapatan. Timpang atau tidaknya pendapatan daerah dapat diukur melalui distribusi penerimaan pendapatan antar golongan masyarakat ataupun antar wilayah.

Ketimpangan spasial sebenarnya telah terjadi di seluruh negara didunia ini, baik negara yang sudah maju maupun negara-negara yang sedang berkembang. Namun perbedaannya adalah ketimpangan spasial lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat

ketimpangannya rendah. Keadaan ini antara lain dijelaskan oleh Todaro (2004), bahwa negara-negara maju secara keseluruhan memperlihatkan pembagian pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan negara-negara dunia ketiga yakni negara-negara yang tergolong sedang berkembang.

Kaldor (1960:27), menyatakan bahwa semakin tidak merata pola distribusi pendapatan, semakin tinggi pula laju pertumbuhan ekonomi karena orang-orang kaya memiliki rasio tabungan yang lebih tinggi dari pada orang-orang miskin sehingga akan meningkatkan *aggregate saving rate* yang diikuti oleh peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jika laju pertumbuhan PDRB merupakan satu-satunya tujuan masyarakat, maka strategi terbaik adalah membuat pola distribusi pendapatan setimpang mungkin. Dengan demikian, model Kuznets dan Kaldor menunjukkan adanya *trade off* atau pilihan antara pertumbuhan PDRB yang lambat tetapi dengan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Dua model ketimpangan yaitu teori Harrod-Domar dan Neo-Klasik memberikan perhatian khusus pada peranan kapital yang dapat direpresentasikan dengan kegiatan investasi yang ditanamkan pada suatu daerah untuk menarik kapital kedalam daerahnya, hal ini jelas akan berpengaruh pada kemampuan daerah untuk tumbuh sekaligus menciptakan perbedaan dalam kemampuan menghasilkan pendapatan. Investasi akan lebih menguntungkan bila dialokasikan pada daerah-daerah yang dinilai mampu menghasilkan pengembalian (*return*) yang besar dalam jangka waktu yang relatif cepat. Mekanisme pasar justru akan menyebabkan ketidakmerataan, dimana daerah-daerah yang relatif maju akan bertumbuh semakin cepat sementara daerah yang kurang maju tingkat

pertumbuhannya justru relatif lambat. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya ketimpangan spasial antar daerah, sehingga diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan dalam mengarahkan alokasi investasi menuju suatu kemajuan ekonomi yang lebih berimbang diseluruh wilayah dalam negara.

Terjadinya ketimpangan antar daerah juga diterangkan oleh Myrdal (1957:64) membangun teori keterbalakangan dan pembangunan ekonominya di sekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskan hal tersebut, beliau memakai ide “*spread effect*” dan “*backwash effect*” sebagai bentuk pengaruh penjaralan dari pusat pertumbuhan kedaerah sekitar. *Spreadeffect* (dampak sebar) didefinisikan sebagai suatu pengaruh yang menguntungkan (*favorable effect*), yang mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi di pusat pertumbuhan kedaerah sekitar. *Backwash effect* (dampak balik) didefinisikan sebagai pengaruh yang merugikan (*infavorable effect*) yang mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar atau pinggiran termasuk aliran modal ke wilayah inti, sehingga mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti.

Terjadinya ketimpangan regional menurut Myrdal (1957:68) disebabkan oleh besarnya pengaruh dari *backwash effect* dibandingkan dengan *spread effect* di negara-negara terbelakang. Perpindahan modal cenderung meningkatkan ketimpangan regional, permintaan yang meningkat ke wilayah maju akan merangsang investasi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan yang menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya, lingkup investasi yang

lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang.

2.1.6. Teori Aglomerasi

Terdapat beberapa teori yang berusaha mengupas tentang masalah aglomerasi. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai teori-teori tersebut, perlu dipahami lebih dahulu konsep aglomerasi. Istilah aglomerasi muncul pada dasarnya berawal dari ide Marshall tentang penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*) atau dalam istilah Marshall disebut sebagai industri yang terlokalisir (*localized industries*). *Agglomeration economies* atau *localized industries* menurut Marshall muncul ketika sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatan produksinya yang memungkinkan dapat berlangsung dalam jangka panjang sehingga masyarakat akan banyak memperoleh keuntungan apabila mengikuti tindakan mendirikan usaha disekitar lokasi tersebut (Mc Donald, 1997: 37). Konsep aglomerasi menurut Montgomery (1988: 693) adalah penghematan aglomerasi sebagai penghematan akibat adanya lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan pengelompokan perusahaan, tenaga kerja, dan konsumen secara spasial untuk meminimisasi biaya-biaya seperti biaya transportasi, informasi dan komunikasi. Sementara Markusen menyatakan bahwa aglomerasi merupakan suatu lokasi yang “tidak mudah berubah” akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa-jasa, dan bukan akibat kalkulasi perusahaan atau para pekerja secara individual

(Kuncoro, 2002:24). Selanjutnya dengan mengacu pada beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aglomerasi merupakan konsentrasi dari aktifitas ekonomi dan penduduk secara spasial yang muncul karena adanya penghematan yang diperoleh akibat lokasi yang berdekatan.

Istilah aglomerasi pada dasarnya berawal dari ide Marshall tentang penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*) atau disebut sebagai industri yang terlokalisasi (*localized industries*). Menurut Montgomery (dalam Kuncoro, 2002:24) aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (*economies of proximity*) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan, para pekerja dan konsumen.

Sementara Markusen dalam Kuncoro (2002:24) dalam menyatakan bahwa aglomerasi merupakan suatu lokasi yang “tidak mudah berubah” akibat adanya penghematan eksternal yang terbuka bagi semua perusahaan yang letaknya berdekatan dengan perusahaan lain dan penyedia jasa-jasa, dan bukan akibat kalkulasi perusahaan atau para pekerja secara individual.

Pada teori ini bahwa aglomerasi muncul karena para pelaku ekonomi berupaya mendapatkan penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*), baik karena penghematan lokalisasi maupun penghematan urbanisasi, dengan mengambil lokasi yang saling berdekatan satu sama lain (Kuncoro, 2002:26). Aglomerasi ini mencerminkan adanya sistem interaksi antara pelaku ekonomi yang sama, apakah antar perusahaan antar industri yang sama, antar perusahaan antar industri yang berbeda, ataupun antar individu, perusahaan dan rumah tangga.

Di lain pihak, kota adalah suatu daerah keanekaragaman yang menawarkan manfaat kedekatan lokasi konsumen maupun produsen. Berdasarkan beberapa kutipan definisi diatas dapat ditarik benang merah bahwa suatu aglomerasi tidak lebih dari sekumpulan kluster industri dan merupakan konsentrasi dari aktivitas ekonomi dari penduduk secara spasial yang muncul karena adanya penghematan yang diperoleh akibat lokasi yang berdekatan.

Perusahaan-perusahaan dalam industri yang terkonsentrasi secara spasial tersebut juga terkait dengan institusi-institusi yang dapat mendukung industri secara praktis. Aglomerasi meliputi kumpulan perusahaan dan hal yang terkait dalam industri yang penting dalam kompetisi. Aglomerasi selalu memperluas aliran menuju jalur pemasaran dan konsumen, tidak ketinggalan juga jalur menuju produsen, produk komplementer, dan perusahaan lain dalam industri yang terkait, baik terkait dalam keahlian, teknologi maupun input. Aglomerasi menginterpretasikan jaringan yang terbentuk dan menjadi semakin kokoh dengan sendirinya tidak hanya oleh perusahaan dalam aglomerasi tersebut tetapi oleh organisasi yang lain yang terkait sehingga menciptakan kolaborasi dan kompetisi dalam tingkatan yang tinggi untuk dapat meningkatkan daya saing berdasarkan keunggulan komparatif.

2.1.6.1. Keuntungan Aglomerasi

Menurut Perroux dalam Arsyad (1999:356), terjadinya aglomerasi industri mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu yaitu skala ekonomis (usaha dalam jumlah besar) dan keuntungan penghematan biaya, yaitu:

1. Keuntungan Internal Perusahaan

Keuntungan ini muncul karena adanya faktor-faktor produksi yang tidak dapat dibagi yang hanya diperoleh dalam jumlah tertentu. Kalau dipakai dalam jumlah yang lebih banyak, biaya produksi per unit akan jauh lebih rendah dibandingkan jika dipakai dalam jumlah yang lebih sedikit.

2. Keuntungan Lokalisasi (*Localization Economies*)

Keuntungan ini berhubungan dengan sumber bahan baku atau fasilitas sumber. Artinya dengan menumpuknya industri, maka setiap industri merupakan sumber atau pasar bagi industri yang lain.

3. Keuntungan Ekstern (keuntungan urbanisasi)

Aglomerasi beberapa industri dalam suatu daerah akan mengakibatkan banyak tenaga kerja yang tersedia tanpa membutuhkan latihan khusus untuk suatu pekerjaan tertentu dan semakin mudah memperoleh tenaga-tenaga yang berbakat. Selain itu aglomerasi akan mendorong didirikannya perusahaan jasa pelayanan masyarakat yang sangat diperlukan oleh industri, misal: listrik, air minum, maka biaya dapat ditekan lebih rendah.

Disamping keuntungan skala ekonomis tersebut, aglomerasi mempunyai keuntungan lain yaitu menurunnya biaya transportasi. Pemusatan industri pada suatu daerah akan mendorong didirikannya perusahaan jasa angkutan dengan segala fasilitasnya. Dengan adanya fasilitas tersebut, industri-industri tidak perlu menyediakan atau mengusahakan jasa angkutan sendiri.

Menurut Tarigan (2004), aglomerasi terjadi karena adanya hubungan saling membutuhkan produk diantara berbagai industri, seperti tersedianya fasilitas (tenaga listrik, air, perbengkelan, jalan raya, pemondokan, juga terdapat tenaga kerja terlatih).

2.2. Kajian Penelitian Terdahulu

Sari (2013) dengan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar ketimpangan antar Provinsi di Indonesia, dan untuk menentukan sektor-sektor unggulan di 33 provinsi di Indonesia agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara optimal. Metode analisis yang digunakan adalah analisis pertumbuhan ekonomi, location quotient (LQ), Shift-share, tipologi klassen, indeks Williamson dan hipotesis U terbalik. Hasil penelitian ini menunjukkan sektor jasa dan sektor pertanian termasuk sektor yang berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tiap Provinsi di Indonesia. Masih ada Provinsi di Indonesia yang tergolong dalam Provinsi relatif tertinggal, tercatat sebanyak 14 Provinsi termasuk daerah relatif tertinggal. Disparitas pendapatan antar Provinsi di Indonesia tahun 2004-2010 tergolong tinggi ($> 0,5$) dan mengalami kecenderungan menurun.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian dari Sari (2013) memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Aspek yang sama dari penelitian Norma Rita Sari (2013) adalah sama-sama menganalisis masalah ketimpangan. Selain itu, penelitian Norma Rita Sari (2013) juga memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu tujuan penelitiannya. Di mana penelitian

Norma Rita Sari (2013) menganalisis seberapa besar ketimpangan antar Provinsi di Indonesia dan menentukan sektor-sektor unggulan di 33 provinsi di Indonesia agar pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara optimal. Sedangkan penelitian ini hanya menganalisis ketimpangan spasial antar kabupaten/kota dalam koridor dan antar koridor.

Nurhuda, dkk. (2013) dengan penelitian yang membahas tentang ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur pada periode 2005-2011 dengan variabel PDRB, PAD, DAU, dan IPM dan dianalisis menggunakan indeks Williamson, hipotesis Kuznets, dan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai ketimpangan di Provinsi Jawa Timur tergolong rendah karena nilai indeks Williamson mendekati nol. Selain itu hipotesis Kuznets juga berlaku di provinsi ini. Dari empat variabel (PDRB, PAD, DAU, dan IPM), variabel PAD dan IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Sedangkan untuk PDRB dan PAD tidak diketahui pengaruhnya karena tidak memenuhi syarat pengujian. Adapun persamaan dari penelitian Nurhuda, dkk. (2013) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan indeks Williamson untuk menganalisis ketimpangan dan sama-sama meneliti Provinsi Jawa Timur. Sedangkan perbedaan yang diketahui adalah tahun periode pengamatan, penggunaan hipotesis Kuznets, regresi berganda dan kasus ketimpangan yang diamati. Di mana pada penelitian Nurhuda, dkk. (2013) mengamati ketimpangan pembangunan, sedangkan penelitian ini menganalisis ketimpangan spasial, dan analisis hanya menggunakan indeks Entropy Theil, Williamson, Krugman, dan Herfindahl.

Adha & Wahyunadi (2015) dengan penelitiannya yang bertujuan untuk menentukan tingkat ketimpangan yang terdapat di Provinsi NTB, mengetahui berapa besar tendensi konvergensi yang terjadi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kecepatan konvergensi. Metode yang digunakan adalah panel data, baik *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Hasil penelitian menunjukkan meskipun terjadi peningkatan ketimpangan yang ditunjukkan oleh indeks Williamson dan indeks Entropi Theil yang terus meningkat pada tiap periode pengamatan, namun dari hasil analisis konvergensi menunjukkan bahwa konvergensi adalah eksis di Provinsi NTB. Dengan menggunakan dua model konvergensi, yaitu konvergensi klasik Barro dan Sala-i-Martin dan konvergensi teknologi Dowrick dan Rogers, ditemukan bahwa kecepatan konvergensi untuk masing-masing model berbeda. Dengan menggunakan model klasik, kecepatan konvergensi berkisar antara 3% pertahun, sedangkan menggunakan transfer teknologi kecepatan konvergensi jauh lebih cepat yaitu 13% pertahun. Perbedaan tingkat teknologi antar wilayah berpengaruh besar terhadap kecepatan konvergensi, apabila perbedaan ini bisa di atasi maka akan didapatkan kecepatan konvergensi yang jauh lebih cepat.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Adha & Wahyunadi (2015) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Indeks Theil dan Williamson dalam menganalisis penelitian yang dilakukan. Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian, yaitu penelitian dari Adha & Wahyunadi (2015) dilakukan di Provinsi NTB, sedangkan penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Timur.

Sodik (2011) dengan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketimpangan pendapatan regional antar kecamatan di Kotamadya Yogyakarta dan apakah hipotesis dari Kuznet tentang U-terbalik berlaku di Kotamadya Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan Indeks kesenjangan Entropy Theil dan Indeks Williamson sebagai teknik analisisnya. Hasil penelitian disimpulkan bahwa berdasarkan indeks kesenjangan Entropy Theil menunjukkan kecenderungan peningkatan kesenjangan atau ketimpangan dari tahun 2006-2007. Nilai Indeks Entropy Theil yang semakin membesar menunjukkan kesenjangan/ketimpangan yang semakin membesar pula. Demikian pula sebaliknya, bila indeksnya semakin kecil, maka kesenjangan/ketimpangan akan semakin rendah/ kecil atau dengan kata lain semakin merata. Sedangkan berdasarkan Indeks Williamson menunjukkan terdapat kecenderungan peningkatan kesenjangan/ketimpangan dari tahun 2006-2007. Nilai Indeks Williamson yang semakin membesar menunjukkan kesenjangan/ketimpangan yang semakin membesar pula. Demikian pula sebaliknya, bila indeksnya semakin kecil, maka kesenjangan/ketimpangan akan semakin rendah/kecil atau dengan kata lain semakin merata. Adapun persamaan penelitian dari Sodik (2011) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Indeks kesenjangan Entropy Theil dan Indeks Williamson sebagai teknik analisisnya. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi tahun yang diamati dan pembuktian hipotesis dari Kuznet tentang U-terbalik.

Wei, dkk. (2011) melakukan penelitian untuk menganalisis pembangunan daerah Cina Provinsi Jiangsu melalui studi kasus mengikuti multi skala dan multi

mekanisme kerangka. Peneliti telah mengungkapkan bahwa tren peningkatan ketimpangan regional dan terutama akibat dari pesatnya perkembangan Sunan (Jiangsu Selatan), yang juga mengakibatkan meningkatnya antar-kabupaten meningkatnya ketidaksetaraan antar kabupaten dan pedesaan. Subei (Jiangsu Utara) diketahui menghadapi lebih banyak tantangan karena efek yang kuat dari kuatnya aglomerasi dan kendala hambatan geografis. Analisis spasial yang menggunakan Indeks Theil mengungkapkan bahwa status perkembangan negara tetangga memiliki pengaruh yang kuat pada dinamika perkembangan kabupaten tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ketika suatu daerah kabupaten dalam kondisi yang miskin, maka kabupaten tetangga akan relatif lebih kaya dengan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk bergerak ke atas, dan begitu sebaliknya.

Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Wei, dkk. (2011) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Indeks Theil dalam penelitiannya. Sedangkan perbedaan yang diketahui adalah terkait dengan lokasi penelitian dimana pada penelitian dari Wei, dkk. (2011) dilakukan di daerah Cina Provinsi Jiangsu dan penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan spesifikasi wilayah adalah Jawa Timur.

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian terdahulu di atas, maka dapat diketahui bahwa setiap penelitian terdahulu yang diuraikan di atas menggunakan Indeks Theil dan Indeks Williamson untuk menganalisis ketimpangan yang terjadi. Hal ini juga mendukung penggunaan kedua indeks tersebut dalam penelitian ini. Penggunaan Indeks Theil dan Indeks Williamson dalam penelitian ini adalah untuk membandingkan tingkat ketimpangan dari masing-masing daerah

dalam koridor (Indeks Theil) dengan ketimpangan yang terjadi antar koridor (Indeks Williamson). Dimana dari hasil penelitian yang diuraikan di atas, hasil dari Indeks Theil dan Indeks Williamson bersifat saling menguatkan (Sodik, 2011; Adha & Wahyunadi, 2015).

Selain dua indeks tersebut, penelitian ini juga menggunakan dua indeks lainnya yaitu Indeks Krugman dan Indeks Herfindahl. Indeks Krugman dan Indeks Herfindahl digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini selain menganalisis ketimpangan juga menganalisis aglomerasi yang terjadi pada suatu wilayah. Jadi Indeks Krugman dan Indeks Herfindahl dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis ada atau tidaknya aglomerasi dalam wilayah yang diteliti. Peneliti menggunakan Indeks Krugman dan Indeks Herfindahl karena peneliti ingin membandingkan hasil dari kedua indeks tersebut. Karena memiliki fungsi yang dapat dinyatakan sama, maka hasil dari kedua indeks tersebut akan saling mendukung dan memperkuat ada atau tidaknya pemusatan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah atau suatu koridor pada wilayah yang diteliti (Hodijah, 2013; Ferdyansyah & Santoso, 2013).

2.3. Kerangka Berpikir

Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan, apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Hal ini mengakibatkan setiap wilayah berusaha untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya dari tahun ke tahun. Akan tetapi adanya perbedaan karakteristik dan sumber daya masing-masing wilayah mengakibatkan hasil-hasil pembangunan di

masing-masing wilayah tidak sama, sehingga terjadi ketimpangan ekonomi baik itu antar wilayah, maupun di dalam wilayah itu sendiri.

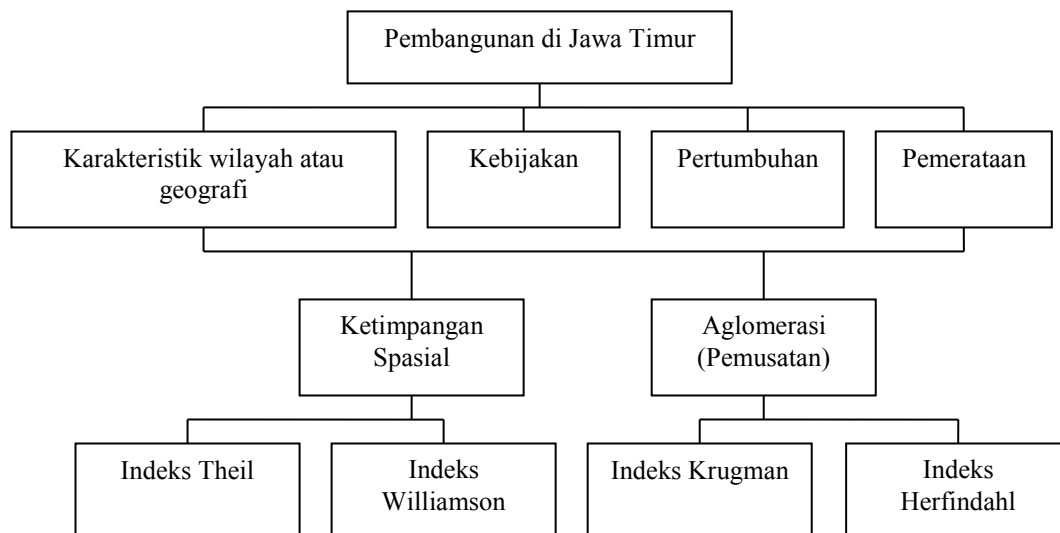
Aglomerasi produksi dapat mempengaruhi kesenjangan wilayah secara langsung, yaitu pada saat terdapat hambatan bagi mobilitas tenaga kerja antar wilayah, atau saat terdapat surplus tenaga kerja dalam perekonomian. Pengukuran aglomerasi menggunakan konsep aglomerasi produksi (Bonet dalam Sigalingging, 2008) dengan menggunakan proporsi PDRB kabupaten/kota terhadap PDRB provinsi Jawa Timur. Ukuran ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemusatan aktivitas ekonomi 33 kabupaten/kota di Jawa Timur terhadap pendapatan regional antar kabupaten/kota.

Perbedaan karakteristik antar koridor memunculkan perbedaan struktur perekonomian masing-masing wilayah memunculkan berbagai tipologi wilayah serta perbedaan tingkat pembangunan di masing-masing wilayah. Sehingga hal ini menjadi sebab perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan di masing-masing wilayah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda di masing-masing wilayah dengan tingkat ketimpangan yang berbeda juga di setiap wilayahnya dapat dibentuk suatu pola hubungan antar kedua variabel tersebut sebagai upaya untuk menentukan arahan pengembangan dan kebijakan wilayah.

Realitas yang terjadi di Jawa Timur, sejak awal industri modern bahwa Jawa Timur diarahkan menjadi wilayah pengolahan hasil pertanian, terutama industri gula dan industri berat. Hal ini menjadikan di wilayah Jawa Timur muncul banyak industri dan pabrik-pabrik yang kemudian mempengaruhi wilayah Jawa Timur memiliki pertumbuhan industri yang cukup pesat. Dengan adanya kondisi tersebut memberikan

dampak pada ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur karena adanya aglomerasi industri yang pesat di Jawa Timur. Aglomerasi yang terjadi di Jawa Timur berada di Surabaya. Selain sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, di Surabaya juga memiliki pelabuhan alam dan dihubungkan dengan daerah pedalaman oleh sungai, yang kemudian menjadikan Surabaya memiliki pusat industri gula yang terus berkembang (Tilaar, 2010).

Hal inilah yang kemudian menjadikan adanya ketimpangan dan aglomerasi yang terjadi antar daerah dalam koridor maupun antar koridor di Jawa Timur. Diperlukan kebijakan yang sesuai untuk masing-masing tipe koridor, sehingga setiap koridor dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh masing-masing koridor tersebut sehingga dapat mengurangi tingkat ketimpangan, serta dapat mengoptimalkan laju pertumbuhan ekonomi yang dimiliki masing-masing koridor pembangunan di provinsi Jawa Timur tersebut.



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.2 di atas, maka dapat diketahui bahwa dengan beragam keunikan dan kondisi berbagai daerah di koridor yang ada di Jawa Timur

menjadikan tingkat pembangunan antar wilayahnya berbeda dan cenderung tidak merata. Hal ini terlihat dari adanya beragam perbedaan di karakteristik wilayah atau geografi, kebijakan, pertumbuhan, dan tingkat pemerataan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut menyebabkan timbulnya ketimpangan secara spasial dan munculnya aglomerasi (pemusatan).

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisa lebih lanjut terkait dengan besarnya tingkat ketimpangan spasial antar kabupaten/kota dalam koridor dan juga besarnya tingkat ketimpangan spasial antar koridor pembangunan di Jawa Timur, serta mengetahui tingkat aglomerasi yang terjadi di Jawa Timur. Sesuai dengan gambar 2.2 di atas, diketahui ketimpangan spasial dapat diukur dengan menggunakan Indeks Theil dan Indeks Williamson. Tingkat aglomerasi dapat diukur menggunakan Indeks Krugman dan Indeks Herfindahl. Indeks Entropi Theil dapat digunakan untuk menghitung ketimpangan spasial kabupaten/kota dalam koridor pembangunan di provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk indeks krugman digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pemusatan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah atau suatu koridor di Jawa Timur. Selanjutnya adalah indeks herfindahl digunakan juga untuk mengetahui ada atau tidaknya konsentrasi aktifitas ekonomi.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan alat analisis Indeks Entropi Theil dan Indeks Williamson untuk analisis ketimpangan dan Indeks Krugman dan Indeks Herfindahl untuk analisis aglomerasi. Indeks Entropy Theil digunakan untuk mengetahui ketimpangan spasial di masing-masing koridor di provinsi Jawa Timur. Dalam perhitungan Indeks Entropy Theil terdiri dari PDRB kabupaten/kota j di koridor i , total PDRB koridor i , jumlah populasi di kabupaten/kota j di koridor i , dan populasi kabupaten/kota di koridor i , dimana elemen-elemen tersebut dihitung sesuai dengan rumus Indeks Entropy Theil (IHH). Indeks Williamson terdiri PDRB per kapita kabupaten/kota, PDRB per kapita provinsi, jumlah penduduk kabupaten/kota, jumlah penduduk provinsi. Indeks krugman digunakan untuk melihat ada atau tidaknya pemusatan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah atau suatu koridor di Provinsi Jawa Timur. Perhitungan Indeks Krugman terdiri dari PDRB koridor i , PDRB koridor k , dan PDRB total Jawa Timur. Sedangkan untuk Indeks Herfindahl juga digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya aglomerasi dalam satu koridor saja. Perhitungan Indeks Herfindahl terdiri dari PDRB koridor i dan PDRB total Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini difokuskan pada pengukuran tingkat ketimpangan pembangunan antar koridor maupun dalam koridor pembangunan di provinsi Jawa Timur. Penelitian ini juga menganalisis tingkat aglomerasi di masing-masing koridor di provinsi Jawa Timur. Lokasi penelitian difokuskan di empat koridor pembangunan di wilayah provinsi Jawa Timur.

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Koridor pembangunan yang terdapat di Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 4 koridor yang pembagiannya berdasarkan 30 kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, maka pembagian 4 koridor pembangunan adalah sebagai berikut:
 - a) koridor Utara – Selatan yang meliputi Gresik -Surabaya - Sidoarjo – Mojokerto – Pasuruan– Malang – Blitar.
 - b) Koridor Timur meliputi Probolinggo -Situbondo - Bondowoso - Lumajang – Jember – Banyuwangi.
 - c) Koridor Barat Daya meliputi Jombang - Kediri - Tulungagung - Trenggalek – Nganjuk - Madiun - Ponorogo - Pacitan – Magetan.
 - d) Dan Koridor Utara meliputi Lamongan – Tuban - Bojonegoro - Ngawi - Bangkalan – Sampang - Pamekasan – Sumenep.

Pengelompokkan kabupaten/kota dalam suatu koridor berdasarkan geografis dan kemiripan corak struktur perekonomiannya.

2. Ketimpangan spasial

Yang dimaksud ketimpangan spasial dalam penelitian ini adalah ketimpangan antar koridor dan ketimpangan antar kabupaten dalam satu koridor.

a) Ketimpangan antar koridor

Keadaan dimana suatu koridor menerima proporsi dan pelaksanaan kemampuan hasil pembangunan ekonomi yang lebih besar daripada koridor pembangunan ekonomi lainnya di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, ketimpangan antar koridor diukur dengan menggunakan indeks Entrophy Theil dengan menggunakan nilai *within inequality* (T_w). Semakin kecil nilai Indeks Theil atau mendekati 0, dapat diartikan bahwa pelaksanaan pembangunan di koridor tersebut semakin merata. Sebaliknya bila angka indeks mendekati 1 berarti tingkat ketimpangan di suatu koridor semakin besar (Akita, 2000).

b) Ketimpangan antar kabupaten dalam satu koridor

Ketimpangan antar kabupaten/kota dalam setiap koridor dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indeks Entrophy Theil dengan menggunakan nilai *between inequality* (T_b). Semakin kecil nilai Indeks Theil atau mendekati 0, dapat diartikan bahwa pelaksanaan pembangunan di koridor tersebut semakin merata. Sebaliknya bila angka indeks mendekati 1 berarti tingkat ketimpangan di suatu koridor semakin besar (Akita, 2000).

3. Tingkat aglomerasi dalam penelitian ini adalah menggambarkan konsentrasi kegiatan ekonomi di kabupaten/kota di setiap koridor pembangunan di Jawa

Timur. Aglomerasi ini diukur menggunakan Indeks Krugman dan Indeks Herfindahl. Apabila nilai indeks krugman lebih besar dari satu dianggap terjadi pemusatan aktifitas ekonomi. Untuk melihat tinggi rendahnya tingkat pemusatan aktifitas ekonomi suatu kabupaten/kota, digunakan nilai rata-rata indeks seluruh koridor sebagai pembanding. Sedangkan untuk nilai minimum indeks herfindahl adalah 0 yang artinya tidak ada konsentrasi atau terdapat keanekaragaman yang sempurna.

3.3. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah dihimpun dari berbagai sumber antara lain BPS Jawa Timur serta beberapa sumber terkait lainnya. Data sekunder meliputi: (1) PDRB provinsi Jawa Timur atas dasar harga konstan tahun 2000 periode tahun 2009-2013 berdasarkan koridor pembangunan (2) jumlah penduduk pertengahan tahun provinsi Jawa Timur dari tahun 2009-2013 dan (3) data pendukung lainnya seperti kondisi geografis dan demografis kabupaten/kota pada masing-masing koridor pembangunan di provinsi Jawa Timur.

3.4. Prosedur Pengumpulan data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan data di BPS provinsi Jawa Timur, berbagai laporan penelitian, dan jurnal-jurnal yang mendukung penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian

diolah untuk dianalisis sesuai rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

3.5. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan indeks *Entropi Theil* dan *Williamson* untuk menganalisis ketimpangan spasial dan indeks krugman dan indeks herfindahl untuk menganalisis aglomerasi. Indeks Entropi Theil dapat digunakan untuk menghitung ketimpangan spasial kabupaten/kota dalam koridor pembangunan di provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk indeks krugman digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pemusatan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah atau suatu koridor di Jawa Timur. Selanjutnya adalah indeks herfindahl digunakan juga untuk mengetahui ada atau tidaknya konsentrasi aktifitas ekonomi.

3.5.1. Metode Pengukuran Ketimpangan

3.5.1.1. Indeks Theil

Besarnya ketimpangan spasial kabupaten/kota dalam koridor dan antar koridor dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$T_p = \sum_j \left[\frac{Y_{ij}}{Y_i} \right] \log \left[\frac{\left(\frac{Y_{ij}}{Y_i} \right)}{\left(\frac{N_{ij}}{N_i} \right)} \right] \quad (2)$$

Di mana

T_{pe} : ketimpangan antar kota / kabupaten dalam suatu koridor

Y_{ij} :PDRB kabupaten/kota j di koridor i

- Y_i : total PDRB koridor i
 N_{ij} : jumlah populasi di kabupaten/kota j di koridor i
 N_i : populasi kabupaten/kota di koridor i
i : koridor i
j : kabupaten/kota j

Maka untuk melihat ketimpangan dalam koridor (T_w) dapat dilihat melalui rumus sebagai berikut :

$$T_w = \sum_i \left[\frac{Y_i}{Y} \right] \quad (2.1)$$

Dimana :

- T_w : Ketimpangan antar koridor
 Y_i : PDRB Koridor i
 Y : PDRB Jawa Timur

Untuk melihat ketimpangan antar koridor (T_b) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$T_b = \sum_i \left[\frac{Y_i}{Y} \right] \log \left[\frac{(Y_i/Y)}{(N_i/N)} \right] \quad (2.2)$$

Dimana :

- T_b : Ketimpangan antar koridor pembangunan di Jawa Timur
 Y_i : PDRB koridor i
 Y : PDRB Jawa Timur
 N_i : Populasi koridor i
 N : Populasi Jawa Timur

Dari persamaan (2.1) dan (2.2) dapat didekomposisikan untuk melihat besarnya ketimpangan total melalui rumus sebagai berikut :

$$T_{\text{total}} = T_w + T_b \quad (2.3)$$

Bila nilai Indeks Entropi Theil= 0 maka pemerataan sempurna dan bila nilai indeks semakin jauh dari 0 (nol) maka ketimpangan yang terjadi semakin besar

3.5.1.2. Indeks Williamson

Rumus Indeks Williamson sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 f_i/n}}{Y} \quad (1)$$

Keterangan :

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB per kapita kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur

Y = PDRB per kapita provinsi Jawa Timur

f_i = Jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur

n = Jumlah penduduk provinsi Jawa Timur

Perhitungan Indeks Williamson (IW) berkisar antara $0 < IW < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya daerah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang daerah yang diteliti (Sjafrizal, 2008).

3.5.2. Metode Pengukuran Aglomerasi

3.5.2.1. Indeks Krugman

Adapun rumus indeks krugman adalah sebagai berikut:

$$K_{ik} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{E_i}{E} - \frac{E_k}{E} \right| \quad (3)$$

Keterangan:

- K_{ik} : nilai indeks Krugman koridor i dan koridor k
- E_i : PDRB koridor i
- E_k : PDRB koridor k
- E : PDRB total Jawa Timur

Kriteria dari indeks krugman adalah apabila indeks mendekati nol, maka kedua koridor i dan k tidak terjadi pemusatan aktifitas ekonomi. Jika nilai indeks mendekati dua maka kedua koridor i dan k memiliki pemusatan aktifitas ekonomi. Batas tengah antara angka nol dan dua adalah satu. Sehingga apabila nilai indeks lebih besar dari satu dianggap terjadi pemusatan aktifitas ekonomi. Untuk melihat tinggi rendahnya tingkat pemusatan aktifitas ekonomi suatu kabupaten/kota, digunakan nilai rata-rata indeks seluruh koridor sebagai pembanding (Hodijah, 2013).

3.5.2.2. Indeks Herfindahl

Rumus indeks herfindahl adalah sebagai berikut:

$$HHI = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Y_i}{Y}\right)^2}{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Y_i}{Y}\right)^2} \quad (4)$$

Keterangan:

HHI : Nilai Indeks Herfindahl

Y_i : PDRB Koridor i

Y : PDRB total Provinsi Jawa Timur

Nilai minimum indeks herfindahl adalah 0 yang artinya tidak ada konsentrasi atau terdapat keanekaragaman yang sempurna. Nilai maksimum indeks ini adalah 1 yang berarti terdapat konsentrasi pada satu koridor saja (Ferdiansyah & Santoso, 2013).

BAB 4

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Kondisi Geografis dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

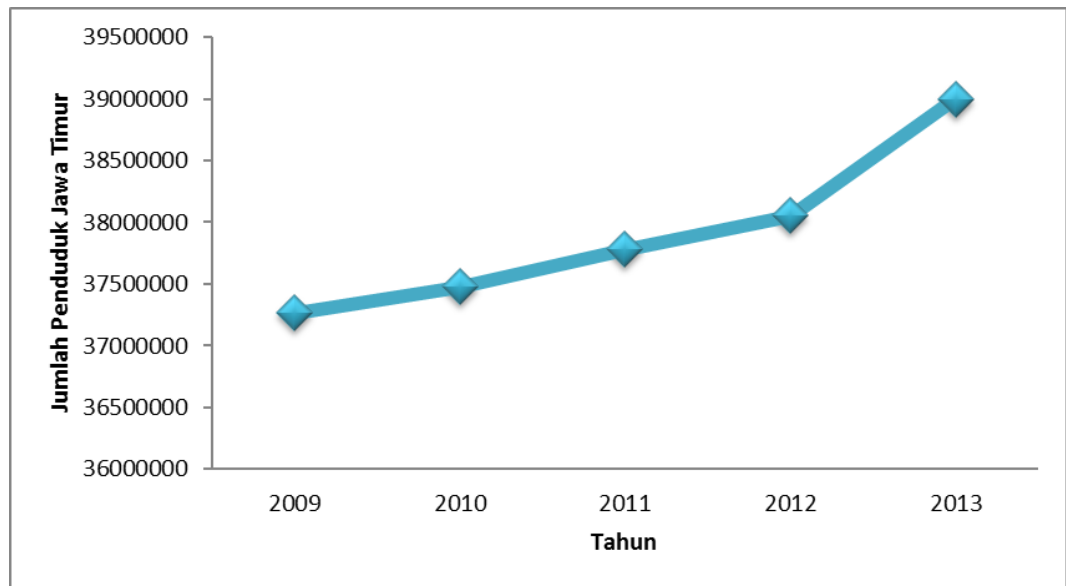
Provinsi Jawa Timur merupakan satu Provinsi di Pulau Jawa yang terletak pada 111,0_° - 114,4_° BT dan 7,12_° - 8,48_° LS. Batas-batas wilayah Provinsi Jawa Timur, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa (Pulau Kalimantan), sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali (Pulau Bali), sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur mencapai 46.428 km² atau 4.642.800 ha yang terbagi ke dalam 29 kabupaten, 9 kota, dan 657 kecamatan dengan 8.497 desa/kelurahan (785 kelurahan dan 8484 desa). Berdasarkan letak geografis tersebut, Provinsi Jawa Timur memiliki iklim tropis basah.

Iklim Jawa Timur jika dibandingkan dengan wilayah Pulau Jawa bagian barat, pada umumnya memiliki curah hujan yang lebih sedikit. Curah hujan rata-rata 1.900 mm per tahun, dengan musim hujan selama 100 hari. Seperti halnya Provinsi lain di Indonesia, Provinsi Jawa Timur mempunyai perubahan musim sebanyak 2 jenis setiap tahunnya yakni musim kemarau (Juni-Oktober) dan musim penghujan (Nopember-Mei). Berdasarkan data terakhir, suhu tertinggi di Jawa Timur di bulan Oktober dan Nopember (35,50_°C) dan terendah di bulan Agustus (19,80_°C) dengan kelembaban 39 - 97 %.

Tekanan udara tertinggi di bulan Agustus sebesar 1.012,0 milibar dan curah hujan terbanyak terjadi di bulan Februari.

Keberadaan Provinsi Jawa Timur merupakan proses sejarah panjang dari adanya wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan sistem sesuai perkembangan pada zamannya. Pembentukan Propinsi Jawa Timur berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950, yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007, tanggal 7 Agustus 2007, tentang Hari Jadi Propinsi Jawa Timur, menetapkan tanggal 12 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Propinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur menunjukkan proyeksi penduduk yang memiliki laju pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Berikut adalah grafik laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Timur dari tahun 2009 hingga tahun 2013.



Sumber: BPS, Statistik Jawa Timur 2014

Gambar 4.1
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Jawa Timur Tahun 2009-2013 (Satuan Jiwa)

Berdasarkan sajian grafik 4.1 dapat diketahui bahwa dari tahun 2009 hingga tahun 2013 jumlah penduduk di Jawa Timur terlihat mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat. Pada tahun 2009, diketahui jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 37.264.601 penduduk. Kemudian pada tahun 2010 jumlah penduduk Jawa Timur naik menjadi 37.476.757 penduduk. Pada tahun 2011 jumlah penduduk diketahui sekitar 37.781.599 penduduk dan naik pada tahun 2012 menjadi 38.052.950 penduduk. Hingga tahun 2013, kenaikan tersebut tetap terjadi hingga mencapai total penduduk Jawa Timur sekitar 38.999.837 penduduk.

Jumlah penduduk terbesar pada umumnya terletak di daerah kota dibandingkan di kabupaten. Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 2.804.150 pada tahun 2013. Kemudian diikuti dengan Kabupaten Jember dengan jumlah penduduk 2.587.188, dan pada urutan ketiga adalah Kabupaten Malang

dengan jumlah penduduknya sebesar 2.428.337. Keberadaan suku atau etnis di Jawa Timur relatif beragam, mayoritas penduduk adalah suku Jawa. Sementara suku Madura mendiami Pulau Madura dan daerah bagian timur, terutama di daerah pesisir utara dan selatan. Di sejumlah kawasan timur, suku Madura, termasuk suku Pendalungan (keturunan campuran antara suku Madura dan Jawa), merupakan mayoritas di Jawa Timur. Suku Madura tersebar hampir di seluruh kota di Jawa Timur, umumnya mereka bekerja di sektor informal. Suku Tengger, yang merupakan suku keturunan pelarian Kerajaan Majapahit, tersebar di Pegunungan Tengger kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Lumajang dan sekitarnya. Suku Osing tinggal di sebagian wilayah Kabupaten Banyuwangi. Suku Bali juga bermukim di sejumlah desa di Kabupaten Banyuwangi. Suku Samin tinggal di sebagian pedalaman Kabupaten Bojonegoro.

Penduduk keturunan Tionghoa dan Arab juga tersebar di hampir semua wilayah kabupaten/kota Jawa Timur. Juga warga ekspatriat, terutama tinggal di Kota Surabaya, dan sejumlah kawasan industri lainnya. Penduduk Jawa Timur sendiri mayoritas beragama Islam (95,76%). Sedangkan penduduk yang beragama Kristen Protestan sebesar 1,98%; Katolik (0,98%); Hindu (0,94%); Budha (0,29%); dan lainnya (0,05%).

Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Selain pembagian wilayah secara administratif menurut kabupaten/kota. Cukup sulit dan merepotkan jika perencanaan ekonomi di tingkat Provinsi mencermati dinamika ke-38 kabupaten/kota tersebut tanpa mengelompokkannya menjadi entitas ekonomi yang lebih besar. Bagaimana pun

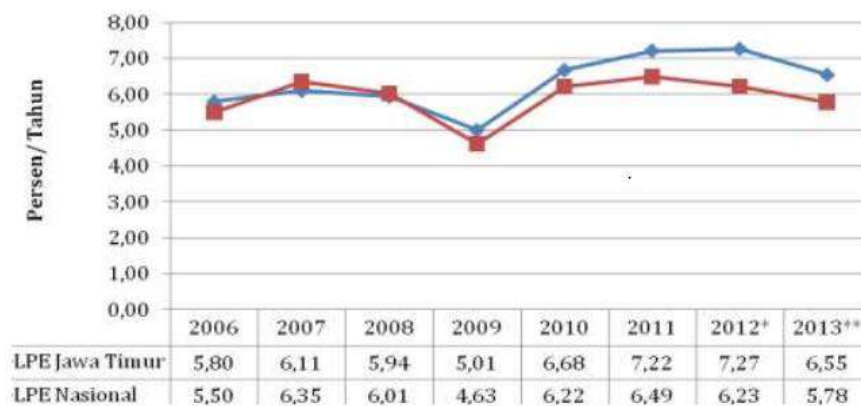
pengelompokkan kabupaten/kota menjadi Provinsi hanyalah konsep integrasi administratif, secara ekonomi pasti juga terjadi integrasi diantara beberapa datu II yang terbentuk karena kedekatan geografis dan/atau kesesuaian karakteristik ekonomi (Sugiarto & Judanto, 2014). Untuk itu dalam penelitian ini wilayah Provinsi Jawa Timur perlu dibagi menurut daerah perencanaan, yaitu menjadi beberapa koridor yang meliputi:

1. Koridor Utara Selatan yang terdiri dari Kabupaten Gresik – Kota Surabaya – Kabupaten Sidoarjo – Kota Mojokerto – Kabupaten Mojokerto – Kabupaten Pasuruan – Kota Pasuruan – Kabupaten Malang – Kota Malang – Kota Batu – Kabupaten Blitar – Kota Blitar;
2. Koridor Barat Daya yang terdiri dari Kabupaten Jombang – Kabupaten Kediri – Kota Kediri – Kabupaten Tulungagung – Kabupaten Trenggalek – Kabupaten – Kabupaten Nganjuk – Kabupaten Madiun – Kota Madiun – Kabupaten Ponorogo – Kabupaten Pacitan – Kabupaten Magetan;
3. Koridor Timur yang terdiri dari Kabupaten Probolinggo – Kota Probolinggo – Kabupaten Situbondo – Kabupaten Bondowoso – Kabupaten Lumajang – Kabupaten Jember – Kabupaten Banyuwangi; dan
4. Koridor Utara yang terdiri dari Kabupaten Lamongan – Kabupaten Tuban – Kabupaten Bojonegoro – Kabupaten Ngawi – Kabupaten Bangkalan – Kabupaten Sampang – Kabupaten Pamekasan – Kabupaten Sumenep.

1.1.1 Perekonomian Jawa Timur

Jawa Timur merupakan barometer perekonomian nasional setelah DKI Jakarta, dan Propinsi Jawa Barat, sebab kontribusi PDRB Jawa Timur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional mencapai sekitar 16%. Perekonomian Jawa Timur ditopang tiga sektor utama, yaitu perdagangan, industri, dan pertanian. Berdasarkan data, menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Timur dari segi posisinya memiliki posisi yang strategis dalam bidng industri. Hal ini dikarenakan Jawa Timur terletak diantara Jawa Tengah dan Bali, sehingga menjadi pusat pertumbuhan industri dan perdagangan (bappenas.go.id).

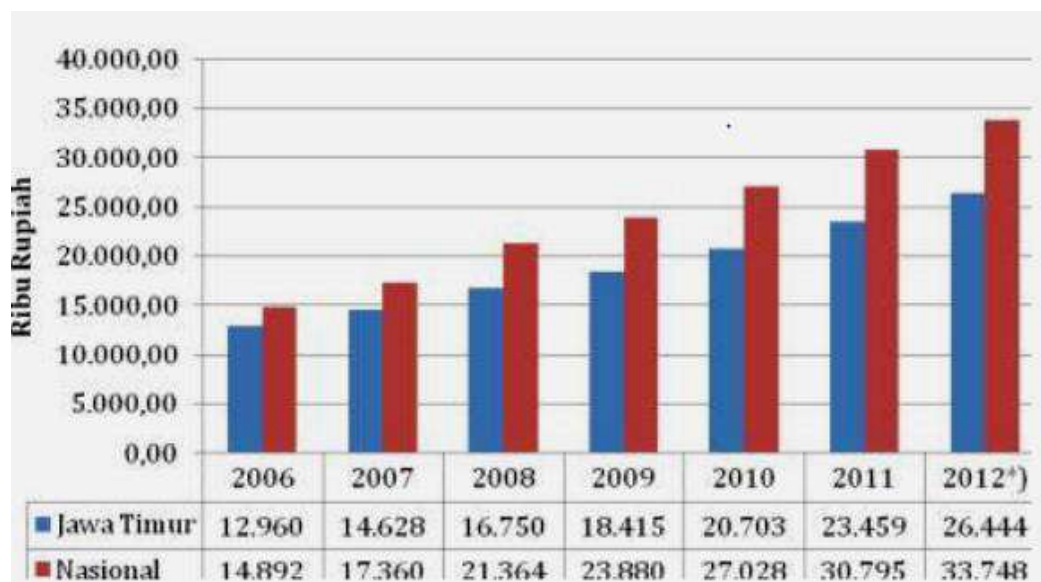
Kinerja perekonomian Jawa Timur selama periode 2006-2013 cukup baik, terlihat dari nilai PDRB yang tumbuh pada laju rata-rata 6,32 persen per tahun (Gambar 4.2). Laju ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada pada angka 5,90 persen per tahun pada periode yang sama. Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi dengan output PDRB terbesar kedua setelah DKI Jakarta dengan sumbangan sebesar 25,28 persen terhadap pembentukan PDRB Wilayah Jawa-Bali dan sebesar 14,88 persen terhadap pembentukan PDB nasional (2013).



Sumber: bappenas.go.id

Gambar 4.2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000

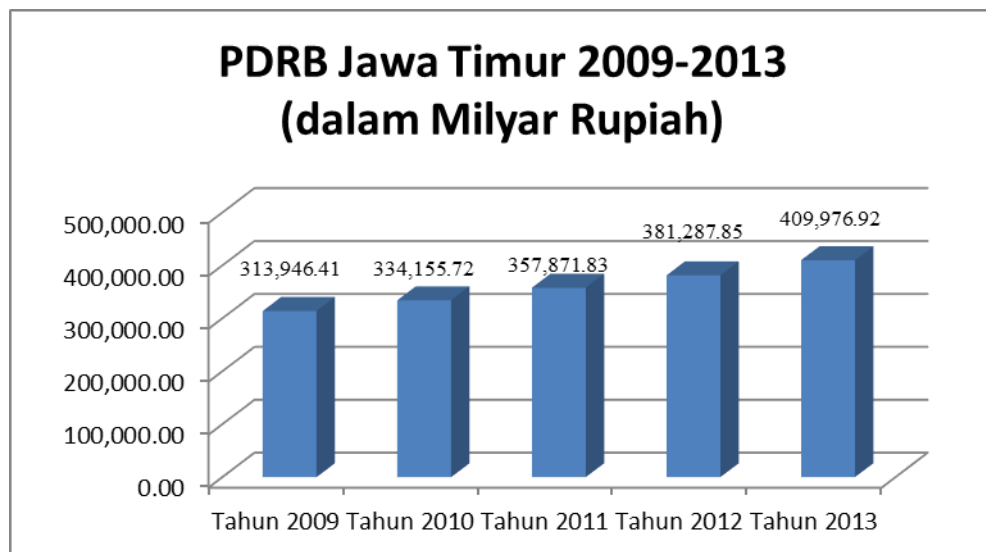
Adanya laju pertumbuhan yang terjadi cukup baik tersebut diketahui belum cukup untuk mengurangi adanya kesenjangan pendapatan perkapita Jawa Timur dari angka rata-rata nasional. Jika pada tahun 2006 rasio antara PDRB/kapita Jawa Timur dan PDB/kapita nasional adalah sebesar 87,03%, maka pada tahun 2013 rasionya berkurang menjadi 78,36%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2006 Provinsi Jawa Timur mampu memberikan kontribusi terhadap 34 Provinsi (Nasional) sebesar 87,03%, namun pada tahun 2013 Provinsi Jawa Timur hanya akan mampu berkontribusi terhadap 34 Provinsi (Nasional) sebesar 78,36%. Hal ini menunjukkan meskipun terlihat adanya kenaikan, namun kenaikan tersebut masih jauh lebih tinggi prosentase kenaikan yang terjadi secara Nasional. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Timur pada tahun 2013 dapat dinyatakan masih kecil dibandingkan dengan Nasional. Hal tersebut dapat disimak dari gambar 4.3 di bawah ini:



Sumber: bappenas.go.id

Gambar 4.3
Jumlah PDRB Jawa Timur Dan Nasional Tahun 2006-2012

Berdasarkan sajian grafik 4.3, maka dapat diketahui bahwa perkembangan atau pertumbuhan perekonomian yang terjadi di wilayah Jawa Timur masih jauh di bawah pertumbuhan ekonomi secara nasional. Data-data yang telah tersaji di atas menggambarkan bahwa secara garis besar laju pertumbuhan pendapatan penduduk di wilayah Jawa Timur sudah dinilai cukup baik. Namun, laju pertumbuhan tersebut masih belum mampu mengejar ketertinggalan PDRB secara nasional. Dari grafik di atas terlihat bahwa PDRB yang diperoleh Jawa Timur masih terlihat jauh di bawah PDRB nasional.



Sumber: BPS, Statistik Jawa Timur 2014

Gambar 4.4
PDRB Jawa Timur 2009-2013 (Milyar Rupiah)

Berdasarkan sajian grafik 4.4, terlihat bahwa pada tahun 2009 Jawa Timur memperoleh PDRB sejumlah 313.946,41 Milyar, dan jumlah tersebut kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi 334.155,72 Milyar. Pada tahun 2011 PDRB Jawa Timur kembali menunjukkan adanya peningkatan hingga sejumlah 357.871.83 Milyar, pada tahun 2012 meningkat

kembali menjadi 381.287,85 Milyar dan pada tahun 2013 PDRB Jawa Timur tetap mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada jumlah 409.976,92 Milyar.

Terus meningkatnya nilai PDRB Jawa Timur, diharapkan dapat merangsang pertumbuhan yang cukup pesat pada masing-masing daerah. Namun dengan banyaknya komposisi daerah di Jawa Timur yang memiliki keragaman dan potensi ekonomi yang berbeda menjadikan kemampuan perkembangan setiap daerah di Jawa Timur berbeda-beda. Hal ini akan memicu terjadinya ketimpangan diantara daerah-daerah di Jawa Timur itu sendiri. Sehingga PDRB yang seharusnya dapat mendukung perkembangan daerah secara merata, bisa hanya akan tersentral pada daerah-daerah tertentu. Sehingga, untuk menganalisis hal tersebut, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terkait pemerataan pendapatan di Jawa Timur dengan menggunakan 4 instrumen indeks yaitu indeks Theil, indeks Williamson, Indeks Krugman, dan Indeks Herfindahl.

4.2 Hasil Analisis

4.2.1 Analisis Indeks Theil

Ying dalam Kuncoro (2006:59) menggunakan Indeks Theil untuk menghitung ketimpangan spasial antar wilayah. Indeks Theil tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu ketimpangan regional dalam wilayah dan ketimpangan regional antar daerah. Indeks Theil memungkinkan untuk membuat perbandingan selama kurun waktu tertentu. Indeks ini juga dapat

menyediakan secara rinci dalam sub unit geografis yang lebih kecil, yang pertama akan digunakan untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan yang kedua juga penting ketika kita mengkaji gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan/ketimpangan spasial. Indeks Enthropi Theil (IET) berkisar antara $0 < IET < 1$, di mana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang dan sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Indeks Theil ini digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan dalam suatu wilayah. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan indeks Theil, penelitian ini akan menyajikan analisis terhadap ketimpangan dalam koridor dan ketimpangan yang terjadi antar koridor dalam wilayah Jawa timur. Adapun hasil perhitungan dari Indeks Theil untuk mengetahui ketimpangan dalam koridor di wilayah Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indeks Theil Untuk Ketimpangan Antar Kota/Kabupaten Dalam Satu Koridor

| Tw | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Koridor Utara-Selatan | 0.0481 | 0.0584 | 0.0590 | 0.0596 | 0.0609 |
| Koridor Barat Daya | 0.0472 | 0.0485 | 0.0489 | 0.0491 | 0.0494 |
| Koridor Timur | 0.0026 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0011 |
| Koridor Utara | 0.0022 | 0.0026 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0026 |
| Tw Jawa Timur | 0.1000 | 0.1104 | 0.1116 | 0.1125 | 0.1140 |

Sumber: Hasil Perhitungan

Berdasarkan sajian data dalam tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai dari hasil perhitungan dalam Indeks Theil di atas lebih mengarah mendekati angka 0. Hal ini menunjukkan bahwa terlihat daerah-daerah di wilayah Jawa Timur baik daerah Kabupatennya maupun daerah Kota tidak terjadi ketimpangan. Hasil di atas juga menjelaskan bahwa daerah pada tiap-tiap koridor tidak terjadi ketimpangan. Artinya, masing-masing koridor memiliki penyebaran pendapatan daerah yang merata. Sehingga, tidak ada daerah dalam koridor tersebut yang mengalami ketimpangan.

Data di atas juga menunjukkan bahwa pengukuran ketimpangan dalam koridor, jika dibandingkan dengan dalam suatu kelompok wilayah (Tw) yang diperoleh Jawa Timur juga menunjukkan angka yang tidak berbeda jauh. Artinya bahwa baik daerah kabupaten maupun kota dalam satu koridor tidak terjadi ketimpangan. Juga dari masing-masing koridor dalam wilayah Jawa Timur terlihat sama tidak adanya ketimpangan spasial.

Kemudian, peneliti juga mengukur tingkat terjadinya ketimpangan antar koridor yang memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indeks Theil Untuk Ketimpangan Antar Koridor

| Tb | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Koridor Utara-Selatan | 0,108015 | 0,104399 | 0,104039 | 0,104118 | 0,109415 |
| Koridor Barat Daya | -0,02196 | -0,01229 | -0,01214 | -0,01198 | -0,01536 |
| Koridor Timur | -0,02145 | -0,02422 | -0,02432 | -0,02434 | -0,02672 |
| Koridor Utara | -0,03409 | -0,02978 | -0,02985 | -0,02997 | -0,03187 |
| Tb Jawa Timur | 0,030508 | 0,038105 | 0,037731 | 0,03783 | 0,035458 |

Sumber: Hasil Perhitungan

Berdasarkan angka dalam tabel 4.2 menunjukkan bahwa angka dari Indeks Theil yang diperoleh lebih cenderung mendekati 0. Hasil tersebut menunjukkan bahwa diantara koridor Utara-Selatan, Barat Daya, Timur, dan Utara tidak terjadi ketimpangan spasial. Hasil tersebut juga didukung dengan perolehan perhitungan antarkelompok wilayah (Tb) Jawa Timur yang menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh juga lebih condong mendekati 0.

Perolehan hasil perhitungan Indeks Theil yang telah diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa diantara Kabupaten atau Kota dalam satu koridor tidak terjadi ketimpangan. Kemudian diantara koridor juga diketahui tidak terjadi ketimpangan spasial. Artinya bahwa dari masing-masing daerah dan koridor memiliki pemerataan pendapatan yang baik. Sehingga, pertumbuhan ekonomi tidak terpusat dalam satu wilayah, melainkan dapat tersebar ke semua wilayah dengan baik.

4.2.2 Analisis Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan per kapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan per kapita nasional. Jadi, Indeks Williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standard deviasi. Nilai Indeks Williamson yang semakin tinggi menunjukkan kesenjangan wilayah semakin besar, dan sebaliknya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penggunaan indeks Williamson dalam penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya ketimpangan yang terjadi antar koridor pada Jawa Timur. Berdasarkan hasil perhitungan indeks

Williamson yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Indeks Williamson Per Koridor di Jawa Timur 2009-2013

| Indeks Williamson | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Koridor | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Koridor Utara-Selatan | 0,584921 | 0,598709 | 0,599676 | 0,600525 | 0,589764 |
| Koridor Barat Daya | 0,497089 | 0,476302 | 0,475489 | 0,474758 | 0,479301 |
| Koridor Timur | 0,45933 | 0,475462 | 0,475129 | 0,47481 | 0,477905 |
| Koridor Utara | 0,472302 | 0,46052 | 0,460452 | 0,460428 | 0,464475 |
| IW Jawa Timur | 0,279354 | 0,271647 | 0,271536 | 0,271328 | 0,268145 |

Sumber: Hasil Perhitungan

Perhitungan Indeks Williamson (IW) berkisar antara $0 < IW < 1$, ketika nilai indeks semakin mendekati nol artinya daerah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang daerah yang diteliti. Berdasarkan sajian data dalam tabel 4.3, dapat diketahui bahwa nilai Indeks Williamson dari masing-masing koridor di bawah 0 dan kurang dari 1. Dengan perolehan nilai Indeks Williamson yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa di antara koridor pembangunan yang ada di Jawa Timur tidak terjadi ketimpangan. Begitu juga nilai dari Indeks Williamson Jawa Timur yang menunjukkan kurang dari satu bahwa dari masing-masing koridor di Jawa Timur memang tidak terjadi ketimpangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa hasil perhitungan dari Indeks Williamson di atas memperkuat hasil dari perhitungan Indeks Theil pada sub bab sebelumnya. Artinya, pada wilayah Jawa Timur dengan data populasi penduduk tahun 2009-2013 dan PDRB tahun 2009-2013 dari masing-masing koridor terbukti tidak terjadi ketimpangan spasial. Begitu juga dengan hasil perhitungan Indeks Williamson yang juga membuktikan bahwa antar koridor

di wilayah Jawa Timur tidak terjadi ketimpangan spasial. Hanya saja aktivitas perekonomian tertinggi terlihat di wilayah koridor Utara-Selatan. Namun hal tersebut tetap tidak menimbulkan adanya ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Jawa Timur dapat didistribusikan dengan merata pada masing-masing daerah dan masing-masing koridor.

4.2.3 Analisis Indeks Krugman

Pada tahap ini, peneliti melakukan perhitungan terkait dengan nilai Indeks Krugman. Indeks Krugman dalam hal ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pemusatan aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah atau suatu koridor di Jawa Timur.

Adapun hasil perhitungan nilai Indeks Krugman yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indeks Krugman Per Koridor di Jawa Timur 2009-2013

| Koridor | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Koridor Utara-Selatan | 0,104422 | 0,105049 | 0,107008 | 0,109566 | 0,112386 |
| Koridor Barat Daya | -0,6027 | -0,60395 | -0,60431 | -0,60474 | -0,60607 |
| Koridor Timur | -0,72916 | -0,7301 | -0,73117 | -0,73189 | -0,73216 |
| Koridor Utara | -0,75983 | -0,75814 | -0,75856 | -0,75984 | -0,7609 |
| Rata-rata | -0,49682 | -0,49679 | -0,49676 | -0,49673 | -0,49668 |

Kriteria yang digunakan dalam pengukuran Indeks Krugman ini adalah apabila nilai indeks mendekati nol, maka diantara koridor tidak terjadi pemusatan aktifitas ekonomi. Bila nilai indeks mendekati dua maka di antara koridor memiliki pemusatan aktifitas ekonomi. Batas tengah antara angka nol

dan dua adalah satu. Sehingga apabila nilai indeks lebih besar dari satu dianggap terjadi pemusatan aktivitas ekonomi. Untuk melihat tinggi rendahnya tingkat pemusatan aktivitas ekonomi suatu kabupaten/kota, maka digunakan nilai rata-rata indeks seluruh koridor sebagai pembanding.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Krugman yang diperoleh dalam penelitian ini diketahui nilai dari semua koridor dalam setiap tahun baik tahun 2009 hingga tahun 2013 nilai Indeks Krugman di bawah satu. Hal ini menunjukkan bahwa diantara koridor terbukti tidak ada pemusatan aktivitas perekonomian. Jika dibandingkan dengan rata-rata indeks keseluruhan, maka dapat dinyatakan bahwa sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2013 aktivitas perekonomian tertinggi terjadi pada koridor Utara-Selatan. Pernyataan tersebut didasarkan pada lebih besarnya nilai Indeks Krugman pada koridor tersebut dibandingkan dengan nilai rata-rata indeks yang diperoleh.

4.2.4 Analisis Indeks Herfindahl

Selain menggunakan Indeks Krugman untuk mengetahui ada atau tidaknya konsentrasi aktivitas ekonomi, dalam penelitian ini juga menggunakan Indeks Herfindahl. Indeks Herfindahl pada dasarnya memiliki prinsip yang sama dengan Indeks Krugman. Kriteria yang diajukan dalam Indeks Herfindahl juga sama yaitu, nilai minimum indeks ini adalah 0 yang menunjukkan bahwa tidak ada konsentrasi atau mendapat keanekaragaman yang sempurna. Nilai maksimum indeks ini adalah 1 yang mengandung arti bahwa telah terdapat konsentrasi pada satu koridor saja.

Adapun hasil perhitungan nilai Indeks Herfindahl yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indeks Herfindahl Per Koridor di Jawa Timur 2009-2013

| Koridor | 2009 | % | 2010 | % | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % |
|------------------------------|------|-------|------|-------|----------|-------|------|-------|------|-------|
| Koridor Utara-Selatan | 0,55 | 55,22 | 0,55 | 55,25 | 0,553504 | 55,35 | 0,55 | 55,48 | 0,56 | 55,62 |
| Koridor Barat Daya | 0,2 | 19,65 | 0,2 | 19,59 | 0,195681 | 19,57 | 0,2 | 19,54 | 0,19 | 19,48 |
| Koridor Timur | 0,13 | 13,33 | 0,13 | 13,28 | 0,132255 | 13,23 | 0,13 | 13,19 | 0,13 | 13,17 |
| Koridor Utara | 0,12 | 11,80 | 0,12 | 11,88 | 0,11856 | 11,86 | 0,12 | 11,79 | 0,12 | 11,73 |
| Jawa Timur | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

Sumber: Hasil Perhitungan

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Indeks Herfindahl yang telah disajikan di atas diketahui bahwa dari empat koridor terlihat nilai Indeks Herfindahl yang tertinggi terletak pada koridor Utara-Selatan. Namun, nilai tersebut masih di bawah angka 0. Jadi dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian ini diketahui tidak adanya konsentrasi atau mendapat keanekaragaman yang sempurna. Namun, dibandingkan dengan nilai Indeks Herfindahl Jawa Timur terlihat nilai yang diperoleh adalah 1. Artinya bahwa di wilayah Jawa Timur dari empat koridor terdapat konsentrasi aktivitas perekonomian, yaitu di koridor Utara-Selatan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Tingkat Ketimpangan Spasial Antara Kabupaten/Kota Dalam Setiap Koridor Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Indeks Theil dalam koridor yang telah dilakukan di atas diketahui bahwa nilai yang diperoleh cenderung semakin mendekati angka 0. Pada koridor Utara-Selatan tahun 2009 memperoleh nilai Indeks Theil dalam kelompok wilayah sebesar 0,048051, kemudian tahun 2010 sebesar 0,058383, tahun 2011 sebesar 0,05898, tahun 2012 sebesar 0,059584, dan tahun 2013 sebesar 0,060866 (Tabel 4.1). Nilai tersebut terlihat mendekati 0, sehingga dapat dinyatakan bahwa di dalam koridor Utara-Selatan yang terdiri dari Gresik -Surabaya - Sidoarjo – Mojokerto – Pasuruan– Malang – Blitar tidak terjadi ketimpangan spasial antar kabupaten/kota dalam koridor Utara Selatan.

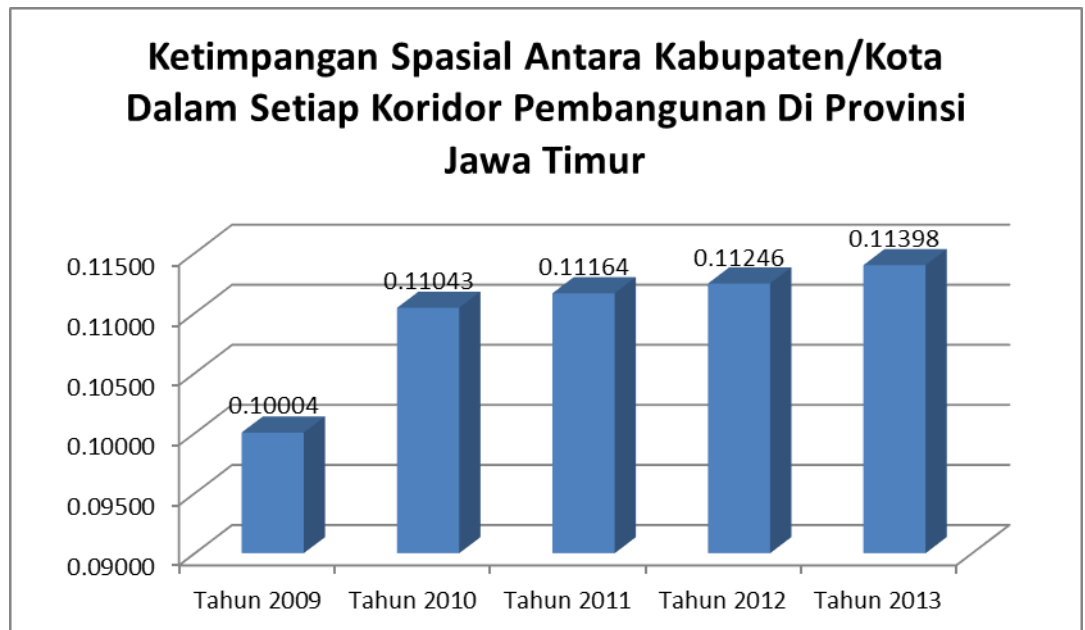
Kemudian untuk koridor barat daya yang terdiri dari Jombang - Kediri - Tulungagung - Trenggalek - Nganjuk- Madiun - Ponorogo - Pacitan – Magetan memperoleh nilai Indeks Theil dalam kelompok wilayah tahun 2009 sebesar 0,047217, tahun 2010 sebesar 0,048452, tahun 2011 sebesar 0,048942, tahun 2012 sebesar 0,049109, dan pada tahun 2013 sebesar 0,049378 (Tabel 4.1). Perolehan tersebut juga menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih cenderung mendekati angka 0. Sehingga dapat dinyatakan bahwa di antara kabupaten/kota di dalam koridor Barat Daya tidak terjadi ketimpangan spasial.

Pada koridor timur yang terdiri dari Probolinggo – Situbondo - Bondowoso - Lumajang – Jember – Banyuwangi memperoleh nilai Indeks

Theil tahun 2009 sebesar 0,002602, tahun 2010 sebesar 0,000984, tahun 2011 sebesar 0,000984, tahun 2012 sebesar 0,000985, dan pada tahun 2013 sebesar 0,001144 (Tabel 4.1). Perolehan tersebut juga menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih cenderung mendekati angka 0. Sehingga dapat dinyatakan bahwa di antara kabupaten/kota di dalam koridor Timur tidak terjadi ketimpangan spasial.

Pada koridor terakhir yaitu koridor Utara yang terdiri dari Lamongan - Tuban- Bojonegoro - Ngawi - Bangkalan - Sampang- Pamekasan - Sumenep memperoleh nilai Indeks Theil tahun 2009 sebesar 0,002174, tahun 2010 sebesar 0,002613, tahun 2011 sebesar 0,002739, tahun 2012 sebesar 0,002778, dan pada tahun 2013 sebesar 0,002594 (Tabel 4.1). Perolehan tersebut juga menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih cenderung mendekati angka 0. Sehingga dapat dinyatakan bahwa di antara kabupaten/kota di dalam koridor Timur tidak terjadi ketimpangan spasial.

Hasil perhitungan Indeks Theil yang telah diuraikan di atas menjelaskan bahwa di wilayah Jawa Timur, pendapatan yang diperoleh oleh setiap daerah dalam masing-masing koridor tidak memiliki kesenjangan atau perbedaan yang signifikan. Masing-masing daerah memiliki kemampuan dalam memperoleh pendapatan dengan baik. Sehingga, pendapatan yang diperoleh tetap merata dan tidak terjadi ketimpangan. Hasil tersebut juga dapat ditinjau dalam grafik berikut ini:



Sumber: BPS, Statistik Jawa Timur 2014

Gambar 4.5
Tingkat Ketimpangan Spasial Antara Kabupaten/Kota Dalam Setiap
Koridor Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan sajian gambar 4.5 diketahui bahwa dari tahun 2009 hingga tahun 2013 terlihat memperoleh nilai Indeks Theil (*within inequality*) yang lebih cenderung mendekati angka 0. Grafik di atas semakin mempertegas bahwa mulai 2009 hingga 2013 terlihat bahwa tidak ada ketimpangan yang terjadi diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Sebagai wilayah perekonomian terbesar kedua setelah DKI Jakarta, wilayah Jawa Timur menunjukkan bahwa setiap daerahnya telah memiliki kemampuan perekonomian yang cukup baik dalam hal mendukung perkembangan dan pertumbuhan di masing-masing daerahnya. Sehingga, setiap daerah mampu berkembang dan tumbuh dengan baik. Hal ini didukung dengan adanya bukti dari penelitian ini yang menyatakan bahwa tidak ada ketimpangan spasial di antara wilayah dalam satu koridor.

Kondisi ini menunjukkan bahwa peran dari pemerintah Daerah seperti Bupati atau Gubernur dan setingkatnya telah berhasil dalam mengatur perekonomian dalam distrik pemerintahannya. Selain dengan menggunakan perhitungan dari nilai Indeks Theil (*between inequality*), untuk mengetahui ada atau tidaknya ketimpangan spasial yang terjadi di antara koridor di Jawa Timur, pada penelitian ini juga menggunakan indeks Williamson. Pada hasil yang telah disajikan diketahui bahwa perolehan nilai indeks untuk koridor Utara-Selatan sebesar 0,584921 pada tahun 2009, kemudian sebesar 0,598709 untuk tahun 2010, pada tahun 2011 sebesar 0,599676, tahun 2012 sebesar 0,600525, dan tahun 2013 sebesar 0,589764 (Tabel 4.4).

Pada koridor Barat Daya memperoleh hasil sebesar 0,497089 tahun 2009, tahun 2010 sebesar 0,476302, tahun 2011 sebesar 0,475489, pada tahun 2012 sebesar 0,474758, dan pada tahun 2013 sebesar 0,479301. Pada koridor Timur memperoleh nilai indeks Williamson sebesar 0,45933 pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 sebesar 0,475462, tahun 2011 sebesar 0,475129, tahun 2012 sebesar 0,47481, dan pada tahun 2013 sebesar 0,477905. Sedangkan untuk koridor Utara nilai indeks yang diperoleh pada tahun 2009 sebesar 0,472302, tahun 2010 sebesar 0,46052, tahun 2011 sebesar 0,460452, tahun 2012 sebesar 0,460428, dan pada tahun 2013 sebesar 0,464475 (Tabel 4.3).

Berdasarkan hasil dari Indeks Williamson juga diketahui bahwa dari masing-masing koridor memperoleh nilai Indeks di bawah angka 0. Hal ini menunjukkan bahwa dengan Indeks Williamson juga terbukti tidak adanya

ketimpangan spasial di antara koridor di Jawa Timur. Artinya, hasil dari Indeks Williamson sama dengan hasil dari Indeks Theil (*between inequality*), artinya kedua indeks tersebut saling menguatkan bahwa tidak ada ketimpangan spasial diantara koridor di Jawa Timur.

Hal ini menunjukkan bahwa program pemerintah yang memberikan wewenang pemerintahan pada daerah (otonomi daerah), sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pembangunan ekonominya sendiri telah mampu secara bertahap memberikan kesejahteraan kepada penduduknya di setiap daerah. UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan harapan suatu daerah untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri sehingga ketimpangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor secara bertahap dapat diperkecil.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka harapan yang terkandung di dalam UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dinyatakan telah mampu dicapai oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur. Sebab, terbukti di daerah-daerah dalam masing-masing koridor tidak terlihat adanya ketimpangan spasial. Hal ini mencerminkan bahwa pendapatan di daerah dalam masing-masing koridor telah didistribusikan dengan baik sehingga dapat merata ke setiap daerah. Sehingga, pada akhirnya kondisi tersebut tidak menciptakan kesenjangan atau ketimpangan diantara daerah dalam satu koridor tersebut.

Bigsten (1987) dalam Arsyad (1999:302) mengemukakan bahwa distribusi pendapatan pada sebuah perekonomian adalah hasil akhir dari seluruh proses ekonomi. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa dengan terbuktinya tidak adanya ketimpangan spasial di antara daerah dalam satu koridor menunjukkan bahwa proses ekonomi dalam koridor tersebut telah berlangsung dengan tertib dan baik. Sehingga, pendapatan yang diperoleh daerah-daerah dalam setiap koridor merata ke setiap daerah di dalam koridor tersebut.

Todaro (2003:175) menjelaskan bahwa pemerataan yang lebih adil di negara berkembang merupakan suatu kondisi atau syarat yang menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin timpang distribusi pendapatan di suatu negara akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi yang terletak di Indonesia yang merupakan negara berkembang. Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pada setiap koridor pembangunan di Jawa Timur terbukti tidak adanya ketimpangan spasial. Sesuai dengan penjelasan Todaro (2003:178), maka kondisi tersebut akan memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian Jawa Timur. Semakin rendahnya ketimpangan spasial yang ada di Jawa Timur, maka semua daerah atau wilayah di Jawa Timur memperoleh peluang yang sama untuk bergerak tumbuh. Hal ini juga akan merangsang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengarah ke arah yang lebih baik.

Semakin kecilnya ketimpangan spasial di Jawa Timur, maka Jawa Timur akan lebih mudah untuk berkembang dan tumbuh menjadi daerah yang

makmur. Sehingga, dengan pertumbuhan perekonomian yang baik, akan mampu membawa penduduknya yang tinggal di Jawa Timur berada pada taraf kehidupan yang cukup baik.

4.3.2 Tingkat Ketimpangan Spasial Yang Terjadi Antar Koridor Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur

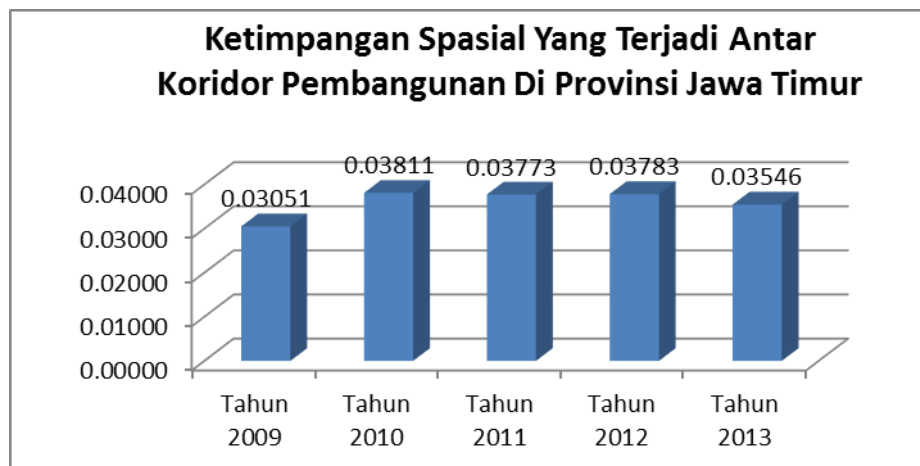
Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Jawa Timur telah memberikan dampak terhadap pembangunan yang berbeda antar koridor pembangunan. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap distribusi pendapatan di masing-masing koridor dalam wilayah Jawa Timur penting untuk mengetahui apakah terdapat ketimpangan atau tidak dalam distribusi pendapatan tersebut. Sehingga, dari penelitian ini akan diketahui apakah terdapat ketimpangan atau tidak diantara koridor dalam wilayah Jawa timur.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Theil (*between inequality*) diketahui bahwa koridor Utara-Selatan pada tahun 2009 memperoleh nilai sebesar 0,108015, pada tahun 2010 sebesar 0,104399, kemudian pada tahun 2011 sebesar 0,104039, pada tahun 2012 sebesar 0,104118, dan pada tahun 2013 sebesar 0,109415. Kemudian pada koridor Barat Daya nilai yang diperoleh untuk tahun 2009 sebesar -0,02196, tahun 2010 sebesar -0,01229, tahun 2011 sebesar -0,01214, tahun 2012 sebesar -0,01198, dan pada tahun 2013 sebesar -0,01536 (Tabel 4.2).

Pada koridor Timur memperoleh nilai Indeks Theil antar kelompok wilayah sebesar -0,02145 pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2010

sebesar -0,02422, tahun 2011 sebesar -0,02432, tahun 2012 sebesar -0,02434, dan pada tahun 2013 sebesar -0,02672. Sedangkan untuk koridor Utara nilai indeks yang diperoleh pada tahun 2009 sebesar -0,03409, tahun 2010 sebesar -0,0299, tahun 2011 sebesar -0,02978, tahun 2012 sebesar -0,02997, dan pada tahun 2013 sebesar -0,03187 (Tabel 4.2).

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui setiap koridor memperoleh nilai Indeks Theil antar kelompok wilayah mendekati angka 0. Sehingga dapat dinyatakan bahwa di antara koridor di Jawa Timur tersebut tidak memiliki kesenjangan pendapatan. Artinya, tidak ada ketimpangan spasial di antara koridor di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi dapat berjalan merata dan tumbuh dengan baik dalam setiap koridor. Sehingga, tidak ada koridor yang mengalami ketertinggalan dengan koridor lainnya. Hasil tersebut juga dapat ditinjau dari data yang tersaji dalam grafik di bawah ini:



Sumber: BPS, Statistik Jawa Timur 2014

Gambar 4.6
Tingkat Ketimpangan Spasial Antara Koridor Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan sajian gambar 4.6 di atas diketahui bahwa dari tahun 2009 hingga tahun 2013 antar koridor pembangunan terlihat memperoleh nilai Indeks Theil yang lebih cenderung mendekati angka 0. Grafik di atas semakin mempertegas bahwa mulai 2009 hingga 2013 terlihat bahwa tidak ada ketimpangan spasial antar koridor pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena di setiap daerah di Jawa Timur seperti di Madura, Banyuwangi, Madiun, Kediri, Malang, dan masih banyak lagi daerah lainnya memiliki kegiatan ekonomi yang mampu menyokong pendapatan perkapita yang kemudian mampu memberikan sumbangsih pada peningkatan pendapatan daerah.

Artinya, kegiatan-kegiatan industri kecil atau usaha kecil menengah (UKM) yang sedang berkembang pesat di masing-masing daerah telah memberikan semangat perekonomian daerah. Sehingga, dari kegiatan UKM tersebut mampu meningkatkan pendapatan masing-masing daerah. Kondisi tersebut kemudian menjadikan setiap daerah memiliki tingkat pendapatan yang tidak jauh berbeda dengan daerah lain. Sehingga, dari masing-masing daerah tidak mengalami kesenjangan atau ketimpangan spasial.

Adelman dan Moris berpendapat bahwa kesenjangan pendapatan di daerah ditentukan oleh jenis pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh ukuran negara, sumber daya alam, dan kebijakan yang dianut. Dengan kata lain, faktor kebijakan dan dimensi struktural perlu diperhatikan selain laju pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2004). Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan, maka tidak selalu

berpangku pada kegiatan-kegiatan jual beli atau kegiatan ekonomi yang lainnya. Terdapat aspek lain yang harus diperhatikan dan dapat dikembangkan agar menjadi sumber pendapatan yang potensial bagi daerah.

Hal ini telah dipraktikan oleh masing-masing koridor di Jawa Timur. Sebagaimana yang diketahui umum, bahwa potensi sumber daya alam di Jawa Timur sangat kaya dan beragam. Sehingga, hal tersebut dapat dimanfaatkan salah satunya sebagai objek wisata alam yang dapat menarik wisatawan domestik maupun wisatawan Internasional. Dengan kedatangan wisatawan tersebut terutama wisatawan asing akan memberikan devisa pada daerah. Sehingga, semakin banyaknya objek wisata tersebut didatangi oleh wisatawan akan semakin banyak pula pendapatan daerah dari sektor wisatanya.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang berupa pengembangan usaha kecil mandiri telah berhasil merangsang semangat masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dengan membuat berbagai usaha kecil mandiri seperti pusat kerajinan tangan, kuliner khas masing-masing daerah, dan lain sebagainya. Sehingga, produk-produk khas daerah tersebut dapat diperdagangkan baik di tingkat daerah itu maupun ke seluruh penjuru negeri ini. Dari setiap kegiatan tersebut tentunya akan memperoleh pendapatan yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal maupun meningkatkan perekonomian daerahnya masing-masing.

Hal-hal inilah yang telah ada di setiap koridor di Jawa Timur. Sehingga, diantara koridor yang ada di Jawa Timur terbukti tidak memiliki tingkat kesenjangan atau tingkat ketimpangan spasial diantara koridor.

4.3.3 Tingkat Aglomerasi Di Setiap Koridor Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur Jawa Timur

Istilah aglomerasi muncul pada dasarnya berawal dari ide Marshall tentang penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*) atau dalam istilah Marshall disebut sebagai industri yang terlokalisir (*localized industries*). Uraian tersebut menunjukkan bahwa aglomerasi merupakan konsentrasi dari aktivitas ekonomi dan penduduk secara spasial yang muncul karena adanya penghematan yang diperoleh akibat lokasi yang berdekatan. Untuk mengetahui ada tidaknya aglomerasi di Jawa Timur, maka dalam penelitian ini menggunakan dua indeks sekaligus, yaitu Indeks Krugman dan Indeks Herfindahl yang pada dasarnya kedua indeks tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pemusatan aktivitas perekonomian dalam suatu daerah.

Hasil perhitungan terkait dengan Indeks Krugman berdasarkan tabel 4.3 yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada koridor Utara-Selatan pada tahun 2009 memperoleh nilai indeks sebesar 0,104422, pada tahun 2010 sebesar 0,105049, pada tahun 2011 sebesar 0,107008, tahun 2012 sebesar 0,109566, dan pada tahun 2013 sebesar 0,112386. Kemudian untuk koridor Barat Daya pada tahun 2009 memperoleh nilai sebesar -0,6027,

pada tahun 2010 sebesar -0,60395, pada tahun 2011 sebesar -0,60431, tahun 2012 sebesar -0,60474, dan pada tahun 2013 sebesar -0,60607 (Tabel 4.3).

Selanjutnya untuk koridor Timur, nilai yang diperoleh pada tahun 2009 adalah sebesar -0,72916, pada tahun 2010 sebesar -0,7301, pada tahun 2011 sebesar -0,73117, tahun 2012 sebesar -0,73189, dan pada tahun 2013 sebesar -0,73216. Kemudian untuk koridor Utara pada tahun 2009 memperoleh nilai sebesar -0,75983, pada tahun 2010 sebesar -0,75814, pada tahun 2011 sebesar -0,75856, tahun 2012 sebesar -0,75984, dan pada tahun 2013 sebesar -0,7609 (Tabel 4.3).

Berdasarkan hasil perhitungan nilai Indeks Krugman yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa nilai indeks pada masing-masing koridor menunjukkan lebih kecil dari angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa diantara koridor di Jawa Timur tidak terjadi aglomerasi atau dengan kata lain tidak adanya pemusatan aktivitas perekonomian di Jawa Timur.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai Indeks Krugman keseluruhan, maka dapat diketahui bahwa pada koridor Utara-Selatan merupakan koridor yang memiliki tingkat aktivitas perekonomian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan koridor lain. Hal ini karena nilai indeks pada koridor Utara-Selatan memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan nilai pada koridor lainnya.

Kondisi ini dapat terjadi karena pada koridor Utara Selatan merupakan koridor dengan daerah-daerah yang memang terkenal memiliki lingkup industri terbanyak di Jawa Timur. Selain itu, di koridor Utara-Selatan juga

terdapat Ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya. Hal ini, menjadikan koridor Utara-Selatan menjadi pusat pemerintahan dan pusatan perekonomian Provinsi. Sehingga, hal tersebut menjadikan koridor Utara-Selatan memiliki kegiatan perekonomian yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan koridor lainnya.

Hasil perhitungan Indeks Herfindahl yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari empat koridor terlihat nilai Indeks Herfindahl yang tertinggi terletak pada koridor Utara-Selatan. Namun, nilai tersebut masih di bawah angka 0. Jadi dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian ini diketahui tidak adanya konsentrasi atau mendapat keanekaragaman yang sempurna. Namun, dibandingkan dengan nilai Indeks Herfindahl Jawa Timur terlihat nilai yang diperoleh adalah 1. Artinya bahwa di wilayah Jawa Timur dari empat koridor terdapat konsentrasi aktivitas perekonomian, yaitu di koridor Utara-Selatan.

Hasil perhitungan nilai Indeks Herfindahl tentunya mendukung perolehan nilai Indeks Krugman. Kedua indeks tersebut menunjukkan hasil yang sama bahwa tidak ada konsentrasi atau pemusatan aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Namun, aktivitas perekonomian tertinggi terletak di koridor Utara-Selatan. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa dalam penelitian ini membuktikan bahwa di wilayah Jawa Timur yang terbagi dalam empat koridor tersebut tidak terjadi aglomerasi.

Meskipun penelitian ini menemukan bahwa koridor Utara-Selatan merupakan koridor yang memiliki aktivitas perekonomian tertinggi,

kemudian bagi koridor lainnya tidak dapat ditingkatkan aktivitas perekonomiannya seperti koridor Utara-Selatan tersebut. Tiga koridor lain seperti koridor Utara, koridor Timur, dan koridor Barat Daya juga masih terlihat memiliki potensi yang dapat dikembangkan, agar aktivitas perekonomian dalam koridor tersebut sama tingginya dengan koridor Utara-Selatan yang sudah tinggi saat ini.

Berdasarkan tinjauan nilai PDRB periode 2009-2013 pada koridor Barat Daya nilai PDRB tertinggi terletak pada Kota Kediri dan nilai PDRB terkecil ada di Kabupaten Pacitan. Koridor Barat Daya memiliki banyak daerah yaitu 11 kabupaten dan kota. Sehingga, mengacu dari nilai PDRB tertinggi yang dimiliki oleh Kota Kediri maka pemerintah setempat dapat memaksimalkan aktivitas perekonomian di wilayah tersebut, sehingga dapat merangsang daerah-daerah lain disekitar Kota Kediri agar aktivitas perekonomian di koridor Barat Daya dapat meningkat menjadi sama tinggi dengan koridor Utara-Selatan.

Hal yang sama juga dapat dilihat pada koridor Timur, dimana nilai PDRB tertinggi terletak pada Kabupaten Jember dan nilai PDRB terendah pada Kota Probolinggo. Sedangkan pada Koridor Utara, nilai PDRB tertinggi terletak pada Kabupaten Tuban, dan nilai PDRB terendah terletak pada Kabupaten Pamekasan. Daerah-daerah tersebut sebenarnya memiliki keunikan atau ciri khas yang dapat menjadi uatu kearifan lokal daerah tersebut sehingga mampu menjadi daya tarik dan nilai jual dari daerah tersebut. Kini tugas pemerintah yang harus mampu memunculkan aspek-

aspek tersebut, agar aktivitas perekonomian di daerah tersebut juga ikut meningkat sebagaimana yang terjadi pada koridor Utara-Selatan dan koridor lainnya.

Meskipun aglomerasi memiliki manfaat seperti yang diuraikan oleh Perroux dalam Arsyad (1999: 356), namun ketika aglomerasi tersebut berada pada lokasi yang salah atau kurang tepat, maka aglomerasi yang harusnya memberikan keuntungan justru akan menimbulkan masalah yang dapat menjadikan adanya ketimpangan spasial dalam daerah tersebut. Salah satu contohnya adalah di wilayah Madura.

Pada kawasan Madura, terdapat sentra batik tulis Madura yang menjadi salah satu khas di daerah tersebut. Batik tersebut sebenarnya merupakan produk dari Kabupaten Sumenep, namun karena faktor lokasi pemasaran, Batik ini sering di jumpai di Kabupaten Bangkalan yang merupakan Kabupaten yang paling dekat dengan akses Suramadu .

Namun, saat ini batik tersebut lebih terkenal berasal dari wilayah Bangkalan. Sehingga, ketika masyarakat memburu batik akan tertuju pada daerah Bangkalan. Sehingga, aktivitas kunjungan wisata terbanyak akan berada di wilayah Bangkalan, sedangkan untuk wilayah Sumenep yang pada dasarnya merupakan daerah asli dari batik tersebut justru tidak pernah atau jarang ada aktivitas kunjungan wisatawan. Kondisi demikian ini jika dibiarkan berlarut-larut akan menjadikan adanya masalah kesenjangan perkembangan ekonomi dan pada akhirnya akan terjadi ketimpangan spasial antara daerah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peran pemerintah dan masyarakat sekitar menjadi sangat penting. Pemerintah diharapkan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat dapat memberikan rangsangan pertumbuhan kegiatan perekonomian di setiap daerah di Jawa Timur. Sedangkan bagi masyarakat, diharapkan dapat mengembangkan potensi daerahnya masing-masing dengan tetap menjaga kearifan lokal yang dimiliki sebagai nilai jual dan daya tarik daerahnya.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan ketiga indeks yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indeks Entrophy Theil, Indeks Krugman, dan Indeks Herfindahl, maka hasil yang diperoleh mampu menjawab rumusan masalah yang diajukan dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada ketimpangan spasial antara kabupaten/kota dalam setiap koridor pembangunan di Provinsi Jawa Timur pada periode 2009-2013. Hal ini didasarkan pada nilai Indeks Theil (*within inequality*) yang menunjukkan bahwa nilai di setiap koridor cenderung lebih mendekati angka 0.
2. Tidak ada ketimpangan spasial di antara koridor pembangunan di Provinsi Jawa Timur pada periode 2009-2013. Hal ini didasarkan pada nilai Indeks Theil (*between inequality*) yang menunjukkan bahwa nilai di setiap koridor cenderung lebih mendekati angka 0.
3. Tidak ada aglomerasi atau pemusatan aktivitas perekonomian di setiap koridor pembangunan di Provinsi Jawa Timur pada periode 2009-2013. Hasil ini didasarkan pada nilai Indeks Krugman dan Indeks Herfindahl yang sama-sama menunjukkan bahwa nilai dari masing-masing lebih kecil atau di bawah angka 1 yang artinya tidak ada pemusatan perekonomian di setiap koridor. Namun penelitian ini menemukan bahwa aktivitas perekonomian tertinggi terletak di koridor Utara-Selatan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah, sebagai pemilik kekuasaan diharapkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya dapat lebih diarahkan pada pengembangan wilayah. Pemerintah Daerah dengan kekuasaannya tersebut dapat membantu para pelaku UMKM dalam memasarkan hasil industrinya. Hal ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara memberikan seminar mengenai strategi marketing atau membantu para pelaku UMKM dalam produknya. Agar hasil produksi dari UMKM dapat dengan mudah menembus pasar domestik maupun Internasional. Hingga pada akhirnya industri-industri tersebut dapat memberikan sumbangan pendapatan daerah dengan cukup besar dari usahanya.
2. Mempermudah setiap prosedur dan keperluan administratif yang harus ditempuh oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Seperti memberikan kemudahan dan kesederhanaan syarat dan prosedur bagi para pelaku UMKM dalam melakukan peminjaman modal untuk pengembangan bisnisnya tersebut. Hal ini dilakukan supaya masyarakat tidak enggan untuk mengembangkan usahanya yang memiliki potensi dan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan perekonomian masyarakat dan daerahnya.

3. Setiap daerah diharapkan tetap bisa menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang dimiliki, supaya kearifan lokal tersebut dapat menjadi kekuatan daerah untuk memperoleh pendapatan daerah yang sangat berpotensi tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, R., & Wahyunadi. 2015. *Disparitas Dan Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, Vol. 1, No. 1.
- Anggoro, Sapto. 2005. *Analisis Disparitas Pendapatan Dalam Kaitannya Dengan Pola Pertumbuhan Wilayah dan Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Wilayah Dati II Kabupaten Boyolali)*. FE UNDIP, Semarang, Skripsi.
- Arsyad, Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- . 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Arifin, Zainal. 2009. *Kesenjangan Dan Konvergensi Ekonomi Atar Kabupaten Pada Empat Koridor Di Propinsi Jawa Timur*. Humanity, Vol. 4, No 2.
- Arifin, Z. 2010. Analisis Perbandingan Perekonomian Pada Empat Koridor Di Propinsi Jawa Timur. *Humanity*, Vol. 5, No. 2, 161-167.
- Bapenas. 2013. Profil Pembangunan Provinsi Jawa Timur. 5 April 2016. <http://www.simreg.bappenas.go.id/document/Profil/ProfilPembangunanJawaTimur>
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, BPFE Yogyakarta.
- Borts, George H, and Jerome L Stein. 1964. *Economic Growth in a Free Market*. New York: Columbia University Press.
- BPS, 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Menurut Pengeluaran Tahun 2009 - 2013*,. Provinsi Jawa Timur.
- BPS, 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 - 2013*,. Provinsi Jawa Timur
- Ferdiansyah, D., & Santoso, E. B. 2013. *Pola Spasial Kegiatan Industri Unggulan Di Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus: Subsektor Industri Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki)*. Jurnal Teknik Pomits, Vol. 2, No. 1.
- Hariadi, Bambang. 2008. *Strategi Manajemen*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Hodijah, S. 2013. *Identifikasi Perekonomian Kabupaten Kerinci*. Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol. 1, No. 7.
- Iswanto, D. 2015. Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur. *Signifikansi*, Vol. 4, No. 1.

- Khadafi, Rozy. 2011. *Analisis Perencanaan Pembangunan Wilayah Jawa Timur: Pendekatan Konvergensi Dan Disparitas Wilayah (Analysis Of Development Planning Of East Java Province: An Approach To Regional Convergence And Disparity)*. FE Unej. Jember. Tesis.
- Kuncoro. M. 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- , 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- , 2006. *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- , 2007. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Kuznets. S., 1955. *Economic Growth and Income Inequality*. American Economic Review (Maret).
- Komariyah Nurul & Muhammad Sjahid Akbar. 2002. *Pengelompokkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Indikator Kemiskinan Dengan Metode Cluster Analysis*.
- Laboratorium Manajemen Fakultas EKonomi Dan Bisnis Universitas Padjajaran; Bappeda Kota Bandung. 2015. *Laporan Akhir Penyusunan Indeks Gini Ratio Kota Bandung*. Bandung.
- Martin, P. and G. Ottaviano. 2001. *Growth and Agglomeration*, *International Economic Review* 42, 947-968.
- Montgomery, M.R. 1988. "How Large is too Large? Implication of the City Size Literature for Population Policy and Research. "*Economic Development and Cultural Change*, Vol. 36, hal 691-720.
- Mudrajad, Kuncoro. 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- , 2002, *Analisis Spasial dan Regional, Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- , 2004. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Myrdal, Gunnar. 1957. *Economic Theory and Underdeveloped Regions*. London: Duckworth.
- Nuryadin, Muhammad Birusman. 2007. *Harga Dalam Perspektif Islam* , Jurnal, Vol. IV, No. 1, Juni 2007.

- Nuryadin, D., Sodik, J., & Iskandar, D. 2007. *Aglomerasi Dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik Regional Di Indonesia*. Parallel Session IVA: Urban & Regional.
- Rubiarko, S. I. 2013. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Di Propinsi Jawa Timur Tahun 2008-2011. *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*.
- Santosa, B.-H., & McMichael, H. 2004. Industrial Development In East Java: A Special Case? *Australian National University Working Paper*.
- Schumpeter J. 2004. *The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle*. Harvard University.
- Sodik, J. 2011. Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan: Studi Kasus Kotamadya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 2004-2007. *Prosiding Seminar Nasional dan Call Of Paper FE "UPN" Yogyakarta*.
- Sukirno, Sadono.1978. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- . 1985. *Ekonomi Pembangunan. Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: FEUI, Bisma Grafika.
- Sukirno. 2007. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Sultan & Jamzani S. 2010. *Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional Di Diy-Jawa Tengah Serta Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Periode (2000-2004)*. Buletin Ekonomi, Vol. 8, No. 1.
- Sutarno. 2003. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas Periode tahun 1993-2003*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.8 No.2 Desember 2003 hal 97-110, FE UGM.
- Syafrizal. 2008. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, Majalah Prisma . No.3 Maret 2008, LP3ES.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. 2003. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 2004. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh. Jakarta: Penerbit Erlangga. Penerjemah: Harris Munandar

- Tilaar, S. 2010. *Tinjauan Sebaran Lokasi Aglomerasi Industri Di Indonesia*. *TEKNO*, Vol. 07, No. 52.
- Widiarto. 2001. *Ketimpangan, Pemerataan dan Infrastruktur*, widoarto@bandung2.wasantara.net.id
- Wei, Y. D., Yu, D., & Chen, X. 2011. *Scale, Agglomeration, And Regional Inequality In Provincial China*. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, Vol. 102, No. 4, 406-425.
- Yuliani, T. 2015. *Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Kalimantan Timur*. *Journal of Economics and Policy*, Vol. 8, No. 1.

Lampiran 1-A

**PDRB Jawa Timur Tahun 2009-2013 Atas Harga Konstan Tahun Dasar 2000
(Miliar Rupiah)**

| No | Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|----|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1 | Pacitan | 1.453,31 | 1.548,22 | 1.651,47 | 1.762,56 | 1.868,72 |
| 2 | Ponorogo | 3.148,98 | 3.331,06 | 3.537,87 | 3.768,42 | 3.982,18 |
| 3 | Trenggalek | 2.889,71 | 3.066,33 | 3.264,44 | 3.480,53 | 3.696,80 |
| 4 | Tulungagung | 7.353,50 | 7.829,89 | 8.357,11 | 8.941,21 | 9.534,42 |
| 5 | Blitar | 5.392,76 | 5.720,37 | 6.082,19 | 6.468,47 | 6.868,26 |
| 6 | Kediri | 7.200,36 | 7.635,06 | 8.108,22 | 8.673,84 | 9.239,10 |
| 7 | Malang | 13.718,80 | 14.578,97 | 15.624,10 | 16.786,42 | 17.901,92 |
| 8 | Lumajang | 6.013,67 | 6.369,90 | 6.768,52 | 7.203,53 | 7.672,42 |
| 9 | Jember | 10.891,61 | 11.550,55 | 12.359,52 | 13.250,98 | 14.165,90 |
| 10 | Banyuwangi | 10.370,29 | 11.015,20 | 11.788,65 | 12.638,53 | 13.511,71 |
| 11 | Bondowoso | 2.978,91 | 3.146,98 | 3.341,96 | 3.557,68 | 3.780,57 |
| 12 | Situbondo | 3.330,42 | 3.522,06 | 3.744,41 | 3.989,29 | 4.263,53 |
| 13 | Probolinggo | 6.358,56 | 6.752,16 | 7.172,49 | 7.642,07 | 8.144,55 |
| 14 | Pasuruan | 6.397,87 | 6.790,94 | 7.267,98 | 7.793,27 | 8.336,15 |
| 15 | Sidoarjo | 24.768,32 | 26.161,61 | 27.966,21 | 29.958,88 | 32.067,61 |
| 16 | Mojoketo | 7.400,48 | 7.902,29 | 8.458,15 | 9.067,74 | 9.693,79 |
| 17 | Jombang | 5.962,26 | 6.327,28 | 6.759,50 | 7.230,30 | 7.695,63 |
| 18 | Nganjuk | 4.979,32 | 5.291,79 | 5.631,76 | 6.008,05 | 6.412,12 |
| 19 | Madiun | 2.899,89 | 3.071,61 | 3.268,56 | 3.478,78 | 3.700,33 |
| 20 | Magetan | 3.092,37 | 3.271,28 | 3.472,77 | 3.694,61 | 3.941,15 |
| 21 | Ngawi | 2.942,60 | 3.121,82 | 3.313,43 | 3.537,20 | 3.784,07 |
| 22 | Bojonegoro | 7.267,53 | 8.128,23 | 8.785,11 | 9.379,58 | 9.876,91 |
| 23 | Tuban | 7.972,83 | 8.468,92 | 9.072,28 | 9.650,28 | 10.328,72 |
| 24 | Lamongan | 5.792,10 | 6.191,07 | 6.625,82 | 7.098,17 | 7.588,27 |
| 25 | Gresik | 15.977,85 | 16.837,44 | 18.081,04 | 19.424,16 | 20.811,65 |
| 26 | Bangkalan | 3.269,71 | 3.447,58 | 3.658,62 | 3.896,49 | 4.142,78 |
| 27 | Sampang | 2.759,77 | 2.907,20 | 3.082,74 | 3.271,50 | 3.459,43 |
| 28 | Pamekasan | 2.054,20 | 2.172,40 | 2.307,31 | 2.453,15 | 2.607,10 |
| 29 | Sumenep | 4.975,23 | 5.255,88 | 5.584,05 | 5.937,68 | 6.319,87 |
| | Kota | | | | | |
| 30 | Kediri | 20.741,61 | 21.967,34 | 23.710,20 | 25.490,23 | 27.133,72 |
| 31 | Blitar | 927,58 | 986,21 | 1.051,20 | 1.122,46 | 1.196,23 |
| 32 | Malang | 13.218,92 | 14.044,63 | 15.038,46 | 16.176,98 | 17.357,45 |
| 33 | Probolinggo | 1.905,23 | 2.021,83 | 2.154,85 | 2.303,40 | 2.460,22 |
| 34 | Pasuruan | 1.057,45 | 1.117,31 | 1.187,59 | 1.264,36 | 1.347,00 |
| 35 | Mojoketo | 1.157,93 | 1.228,44 | 1.308,08 | 1.400,64 | 1.496,66 |
| 36 | Madiun | 1.977,78 | 2.114,84 | 2.266,73 | 2.443,20 | 2.640,37 |
| 37 | Batu | 1.331,99 | 1.432,19 | 1.547,39 | 1.674,98 | 1.812,31 |
| 38 | Surabaya | 82.014,71 | 87.828,84 | 94.471,05 | 101.671,63 | 109.137,30 |

1.2 Lampiran 1-B
**PDRB Jawa Timur Tahun 2009-2013 Atas Harga Konstan Tahun Dasar 2000
 Per Koridor (Miliar Rupiah)**

| Koridor Utara-Selatan | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Gresik | 15977,85 | 16837,44 | 18081,04 | 19424,16 | 20811,65 |
| Pasuruan | 6397,87 | 6790,94 | 7267,98 | 7793,27 | 8336,15 |
| Sidoarjo | 24768,32 | 26161,61 | 27966,21 | 29958,88 | 32067,61 |
| Mojoketo | 7400,48 | 7902,29 | 8458,15 | 9067,74 | 9693,79 |
| Malang | 13718,8 | 14578,97 | 15624,1 | 16786,42 | 17901,92 |
| Blitar | 5392,76 | 5720,37 | 6082,19 | 6468,47 | 6868,26 |
| Kota | | | | | |
| Surabaya | 82014,71 | 87828,84 | 94471,05 | 101671,6 | 109137,3 |
| Pasuruan | 1057,45 | 1117,31 | 1187,59 | 1264,36 | 1347 |
| Mojoketo | 1157,93 | 1228,44 | 1308,08 | 1400,64 | 1496,66 |
| Blitar | 927,58 | 986,21 | 1051,2 | 1122,46 | 1196,23 |
| Batu | 1331,99 | 1432,19 | 1547,39 | 1674,98 | 1812,31 |
| Malang | 13218,92 | 14044,63 | 15038,46 | 16176,98 | 17357,45 |

| Koridor Barat Daya | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Jombang | 5.962,26 | 6.327,28 | 6.759,50 | 7.230,30 | 7.695,63 |
| Kediri | 7.200,36 | 7.635,06 | 8.108,22 | 8.673,84 | 9.239,10 |
| Trenggalek | 2.889,71 | 3.066,33 | 3.264,44 | 3.480,53 | 3.696,80 |
| Tulungagung | 7.353,50 | 7.829,89 | 8.357,11 | 8.941,21 | 9.534,42 |
| Pacitan | 1.453,31 | 1.548,22 | 1.651,47 | 1.762,56 | 1.868,72 |
| Ponorogo | 3.148,98 | 3.331,06 | 3.537,87 | 3.768,42 | 3.982,18 |
| Nganjuk | 4.979,32 | 5.291,79 | 5.631,76 | 6.008,05 | 6.412,12 |
| Madiun | 2.899,89 | 3.071,61 | 3.268,56 | 3.478,78 | 3.700,33 |
| Magetan | 3.092,37 | 3.271,28 | 3.472,77 | 3.694,61 | 3.941,15 |
| Kota | | | | | |
| Kediri | 20.741,61 | 21.967,34 | 23.710,20 | 25.490,23 | 27.133,72 |
| Madiun | 1.977,78 | 2.114,84 | 2.266,73 | 2.443,20 | 2.640,37 |

| Koridor Timur | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Bondowoso | 2.978,91 | 3.146,98 | 3.341,96 | 3.557,68 | 3.780,57 |
| Situbondo | 3.330,42 | 3.522,06 | 3.744,41 | 3.989,29 | 4.263,53 |
| Probolinggo | 6.358,56 | 6.752,16 | 7.172,49 | 7.642,07 | 8.144,55 |
| Lumajang | 6.013,67 | 6.369,90 | 6.768,52 | 7.203,53 | 7.672,42 |
| Jember | 10.891,61 | 11.550,55 | 12.359,52 | 13.250,98 | 14.165,90 |
| Banyuwangi | 10.370,29 | 11.015,20 | 11.788,65 | 12.638,53 | 13.511,71 |
| Kota | | | | | |
| Probolinggo | 1.905,23 | 2.021,83 | 2.154,85 | 2303,40 | 2.460,22 |

| Koridor Utara | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Ngawi | 2.942,60 | 3.121,82 | 3.313,43 | 3.537,20 | 3.784,07 |
| Bojonegoro | 7.267,53 | 8.128,23 | 8.785,11 | 9.379,58 | 9.876,91 |
| Tuban | 7.972,83 | 8.468,92 | 9.072,28 | 9.650,28 | 10.328,72 |
| Lamongan | 5.792,10 | 6.191,07 | 6.625,82 | 7.098,17 | 7.588,27 |
| Bangkalan | 3.269,71 | 3.447,58 | 3.658,62 | 3.896,49 | 4.142,78 |
| Sampang | 2.759,77 | 2.907,20 | 3.082,74 | 3.271,50 | 3.459,43 |
| Pamekasan | 2.054,20 | 2.172,40 | 2.307,31 | 2.453,15 | 2.607,10 |
| Sumenep | 4.975,23 | 5.255,88 | 5.584,05 | 5.937,68 | 6.319,87 |

2.1 Lampiran 2-A

Jumlah Penduduk Jawa Timur Tahun 2009-2013

| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Pacitan | 537,029 | 540,881 | 542,127 | 543,391 | 580,644 |
| Ponorogo | 899,074 | 855,281 | 856,573 | 857,623 | 906,338 |
| Trenggalek | 675,765 | 674,411 | 676,728 | 678,876 | 711,784 |
| Tulungagung | 992,048 | 990,158 | 996,481 | 1,002,113 | 1,070,362 |
| Blitar | 1,070,446 | 1,116,639 | 1,121,848 | 1,126,556 | 1,187,489 |
| Kediri | 1,451,861 | 1,499,768 | 1,509,566 | 1,518,121 | 1,436,839 |
| Malang | 2,425,311 | 2,446,218 | 2,467,711 | 2,487,120 | 2,428,337 |
| Lumajang | 1,028,103 | 1,006,458 | 1,010,865 | 1,014,575 | 1,094,578 |
| Jember | 2,327,957 | 2,332,726 | 2,348,552 | 2,362,179 | 2,587,188 |
| Banyuwangi | 1,535,701 | 1,556,078 | 1,562,851 | 1,568,898 | 1,653,602 |
| Bondowoso | 708,905 | 736,772 | 741,460 | 745,948 | 761,980 |
| Situbondo | 624,888 | 647,619 | 652,523 | 656,691 | 670,337 |
| Probolinggo | 1,044,237 | 1,096,244 | 1,106,436 | 1,115,267 | 1,069,805 |
| Pasuruan | 1,452,629 | 1,512,468 | 1,528,546 | 1,542,837 | 1,548,544 |
| Sidoarjo | 1,802,948 | 1,941,497 | 1,984,234 | 2,024,678 | 1,810,559 |
| Mojoketo | 1,013,988 | 1,025,443 | 1,038,272 | 1,049,967 | 1,075,230 |
| Jombang | 1,301,459 | 1,202,407 | 1,210,479 | 1,217,560 | 1,319,960 |
| Nganjuk | 1,002,530 | 1,017,030 | 1,021,589 | 1,025,515 | 1,066,143 |
| Madiun | 642,638 | 662,278 | 664,422 | 666,373 | 710,832 |
| Magetan | 626,092 | 620,442 | 620,969 | 621,273 | 675,641 |
| Ngawi | 836,737 | 817,765 | 818,457 | 818,871 | 879,343 |
| Bojonegoro | 1,270,876 | 1,209,973 | 1,214,518 | 1,218,457 | 1,269,682 |
| Tuban | 1,080,956 | 1,118,464 | 1,125,679 | 1,131,892 | 1,157,889 |
| Lamongan | 1,189,615 | 1,179,059 | 1,186,721 | 1,193,725 | 1,336,587 |
| Gresik | 1,215,603 | 1,177,042 | 1,195,882 | 1,213,449 | 1,226,577 |
| Bangkalan | 973,681 | 906,761 | 917,374 | 927,433 | 1,049,549 |
| Sampang | 919,548 | 877,772 | 891,293 | 904,314 | 817,910 |
| Pamekasan | 851,690 | 795,918 | 807,828 | 818,662 | 788,611 |
| Sumenep | 1,017,147 | 1,042,312 | 1,048,423 | 1,053,640 | 1,114,139 |
| Kota | | | | | |
| Kediri | 272,610 | 268,507 | 271,328 | 273,679 | 279,785 |
| Blitar | 133,408 | 131,968 | 133,324 | 134,554 | 143,950 |
| Malang | 820,857 | 820,243 | 828,859 | 835,082 | 806,919 |
| Probolinggo | 230,464 | 217,062 | 219,862 | 222,413 | 224,235 |
| Pasuruan | 174,173 | 186,262 | 188,283 | 190,045 | 203,844 |
| Mojoketo | 113,327 | 120,196 | 121,449 | 122,550 | 132,945 |
| Madiun | 179,391 | 170,964 | 171,784 | 172,421 | 201,088 |
| Surabaya | 189,604 | 2,765,487 | 2,785,706 | 2,801,409 | 2,804,150 |
| Batu | 2,631,305 | 190,184 | 192,597 | 194,793 | 196,442 |
| Jawa timur | 37,264,601 | 37,476,757 | 37,781,599 | 38,052,950 | 38,999,837 |

2.2 Lampiran 2-B

Jumlah Penduduk Jawa Timur Per Koridor Tahun 2009-2013

| Koridor Utara-Selatan | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Gresik | 1,215,603 | 1,177,042 | 1,195,882 | 1,213,449 | 1,226,577 |
| Pasuruan | 1,452,529 | 1,512,468 | 1,528,546 | 1,542,837 | 1,548,544 |
| Sidoarjo | 1,802,948 | 1,941,497 | 1,984,234 | 2,024,678 | 1,810,559 |
| Mojoketo | 1,013,988 | 1,025,443 | 1,038,272 | 1,049,967 | 1,075,230 |
| Malang | 2,425,311 | 2,446,218 | 2,467,711 | 2,487,120 | 2,428,337 |
| Blitar | 1,070,446 | 1,116,639 | 1,121,848 | 1,126,556 | 1,187,489 |
| Kota | | | | | |
| Surabaya | 2,631,305 | 2,765,487 | 2,785,706 | 2,801,409 | 2,804,150 |
| Pasuruan | 174,173 | 186,262 | 188,283 | 190,045 | 203,844 |
| Mojoketo | 113,327 | 120,196 | 121,449 | 122,550 | 132,945 |
| Blitar | 133,408 | 131,968 | 133,324 | 134,554 | 143,950 |
| Batu | 189,604 | 190,184 | 192,597 | 194,793 | 196,442 |
| Malang | 820,857 | 820,243 | 828,859 | 835,082 | 806,919 |

| Koridor Barat Daya | | | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Jombang | 1,301,459 | 1,202,407 | 1,210,479 | 1,217,560 | 1,319,960 |
| Kediri | 1,451,861 | 1,499,768 | 1,509,566 | 1,518,121 | 1,436,839 |
| Trenggalek | 675,765 | 674,411 | 676,728 | 678,876 | 711,784 |
| Tulungagung | 992,048 | 990,158 | 996,481 | 1,002,113 | 1,070,362 |
| Pacitan | 537,029 | 540,881 | 542,127 | 543,391 | 580,644 |
| Ponorogo | 899,074 | 855,281 | 856,573 | 857,623 | 906,338 |
| Nganjuk | 1,002,530 | 1,017,030 | 1,021,589 | 1,025,515 | 1,066,143 |
| Madiun | 642,638 | 662,278 | 664,422 | 666,373 | 710,832 |
| Magetan | 626,092 | 620,442 | 620,969 | 621,273 | 675,641 |
| Kota | | | | | |
| Kediri | 272,610 | 268,507 | 271,328 | 273,679 | 279,785 |
| Madiun | 179,391 | 170,964 | 171,784 | 172,421 | 201,088 |

| Koridor Timur | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Bondowoso | 708,905 | 736,772 | 741,460 | 745,948 | 761,980 |
| Situbondo | 624,888 | 647,619 | 652,523 | 656,691 | 670,337 |
| Probolinggo | 104,427 | 1,096,244 | 1,106,436 | 1,115,267 | 1,069,805 |
| Lumajang | 1,028,103 | 1,006,458 | 1,010,865 | 1,014,575 | 1,094,578 |
| Jember | 2,327,957 | 2,332,726 | 2,348,552 | 2,362,179 | 2,587,188 |
| Banyuwangi | 1,535,701 | 1,556,078 | 1,562,851 | 1,568,898 | 1,653,602 |
| Kota | | | | | |
| Probolinggo | 230,464 | 217,062 | 219,862 | 222,413 | 224,235 |

| Koridor Utara | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Ngawi | 836,767 | 817,765 | 818,457 | 818,871 | 879,343 |
| Bojonegoro | 1,270,876 | 1,209,973 | 1,214,518 | 1,218,457 | 1,269,682 |
| Tuban | 1,080,956 | 1,118,464 | 1,125,679 | 1,131,892 | 1,157,889 |
| Lamongan | 1,189,615 | 1,179,059 | 1,186,721 | 1,193,725 | 1,336,587 |
| Bangkalan | 973,681 | 906,761 | 917,374 | 927,433 | 1,049,549 |
| Sampang | 919,548 | 877,772 | 891,293 | 904,314 | 817,910 |
| Pamekasan | 851,690 | 795,918 | 807,828 | 818,662 | 788,611 |
| Sumenep | 1,017,147 | 1,042,312 | 1,048,423 | 1,053,640 | 1,114,139 |

3. Lampiran 3

Perhitungan Indeks Theil

| PDRB | | | | | Populasi | | | | | Tpi | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Koridor Utara-Selatan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Gresik | 15977,9 | 16837,4 | 18081 | 19424,2 | 20811,7 | 1241313 | 1177042 | 1195882 | 1213449 | 1226577 | -0,0011 | 0,00158 | 0,00144 | 0,00126 | 0,00037 |
| Pasuruan | 6397,87 | 6790,94 | 7267,98 | 7793,27 | 8336,15 | 1482756 | 1512468 | 1528546 | 1542837 | 1548544 | -0,018 | -0,0179 | -0,0179 | -0,0178 | -0,0181 |
| Sidoarjo | 24768,3 | 26161,6 | 27966,2 | 29958,9 | 32067,6 | 1912970 | 1941497 | 1984234 | 2024678 | 1810559 | -0,0013 | -0,0012 | -0,0021 | -0,0029 | 0,00319 |
| Mojoketo | 7400,48 | 7902,29 | 8458,15 | 9067,74 | 9693,79 | 951205 | 1025443 | 1038272 | 1049967 | 1075230 | -0,0098 | -0,0108 | -0,0108 | -0,0108 | -0,0115 |
| Malang | 13718,8 | 14579 | 15624,1 | 16786,4 | 17901,9 | 1804461 | 2446218 | 2467711 | 2487120 | 2428337 | -0,019 | -0,0287 | -0,0286 | -0,0285 | -0,0281 |
| Blitar | 5392,76 | 5720,37 | 6082,19 | 6468,47 | 6868,26 | 1263005 | 1116639 | 1121848 | 1126556 | 1187489 | -0,0153 | -0,0133 | -0,0132 | -0,0131 | -0,014 |
| Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| Surabaya | 82014,7 | 87828,8 | 94471,1 | 101672 | 109137 | 2989378 | 2765487 | 2785706 | 2801409 | 2804150 | 0,14988 | 0,17304 | 0,17486 | 0,17643 | 0,17451 |
| Pasuruan | 1057,45 | 1117,31 | 1187,59 | 1264,36 | 1347 | 199849 | 186262 | 188283 | 190045 | 203844 | -0,0024 | -0,0022 | -0,0022 | -0,0022 | -0,0024 |
| Mojoketo | 1157,93 | 1228,44 | 1308,08 | 1400,64 | 1496,66 | 122436 | 120196 | 121449 | 122550 | 132945 | -0,001 | -0,0009 | -0,0009 | -0,0009 | -0,0011 |
| Blitar | 927,58 | 986,21 | 1051,2 | 1122,46 | 1196,23 | 132013 | 131968 | 133324 | 134554 | 143950 | -0,0015 | -0,0014 | -0,0014 | -0,0014 | -0,0016 |
| Batu | 1331,99 | 1432,19 | 1547,39 | 1674,98 | 1812,31 | 186.140 | 190.184 | 192.597 | 194.793 | 196.442 | | | | | |
| Malang | 13218,9 | 14044,6 | 15038,5 | 16177 | 17357,5 | 820320 | 820243 | 828859 | 835082 | 806919 | 0,00654 | 0,00726 | 0,00721 | 0,00735 | 0,00815 |
| Total | 173365 | 184629 | 198083 | 212810 | 228026 | 13105846 | 13433647 | 13586711 | 13723040 | 13564986 | 0,08702 | 0,10567 | 0,10656 | 0,1074 | 0,10943 |
| Provinsi | 313946 | 334156 | 357872 | 383591 | 409977 | 37236149 | 37565706 | 37840657 | 38106590 | 38363195 | | | | | |
| Tw | 0,04805 | 0,05838 | 0,05898 | 0,05958 | 0,06087 | 0,108015 | 0,1043991 | 0,1040393 | 0,104118 | 0,109415 | Tb | | | | |
| Koridor Barat Daya | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | | |
| Jombang | 5962,26 | 6327,28 | 6759,5 | 7230,3 | 7695,63 | 1345170 | 1202407 | 1210479 | 1217560 | 1319960 | -0,0162 | -0,016 | -0,0161 | -0,0162 | -0,0178 |

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Kediri | 7200,36 | 7635,06 | 8108,22 | 8673,84 | 9239,1 | 1504149 | 1499768 | 1509566 | 1518121 | 1436839 | -0,0156 | -0,021 | -0,0213 | -0,0214 | -0,0164 |
| Trenggalek | 2889,71 | 3066,33 | 3264,44 | 3480,53 | 3696,8 | 797249 | 674411 | 676728 | 678876 | 711784 | -0,0119 | -0,0107 | -0,0107 | -0,0108 | -0,0109 |
| Tulungagung | 7353,5 | 7829,89 | 8357,11 | 8941,21 | 9534,42 | 1120042 | 990158 | 996481 | 1002113 | 1070362 | 0,00037 | 0,00139 | 0,00118 | 0,00106 | -2E-05 |
| Pacitan | 1453,31 | 1548,22 | 1651,47 | 1762,56 | 1868,72 | 547504 | 540881 | 542127 | 543391 | 580644 | -0,0092 | -0,0102 | -0,0101 | -0,0101 | -0,0104 |
| Ponorogo | 3148,98 | 3331,06 | 3537,87 | 3768,42 | 3982,18 | 1008112 | 855281 | 856573 | 857623 | 906338 | -0,0163 | -0,0151 | -0,015 | -0,015 | -0,0153 |
| Nganjuk | 4979,32 | 5291,79 | 5631,76 | 6008,05 | 6412,12 | 1234160 | 1017030 | 1021589 | 1025515 | 1066143 | -0,0168 | -0,0138 | -0,0139 | -0,0139 | -0,0137 |
| Madiun | 2899,89 | 3071,61 | 3268,56 | 3478,78 | 3700,33 | 710282 | 662278 | 664422 | 666373 | 710832 | -0,0096 | -0,0103 | -0,0104 | -0,0104 | -0,0108 |
| Magetan | 3092,37 | 3271,28 | 3472,77 | 3694,61 | 3941,15 | 695651 | 620442 | 620969 | 621273 | 675641 | -0,0083 | -0,0082 | -0,0082 | -0,0082 | -0,0091 |
| Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kediri | 20741,6 | 21967,3 | 23710,2 | 25490,2 | 27133,7 | 316190 | 268507 | 271328 | 273679 | 279785 | 0,3371 | 0,34447 | 0,34797 | 0,34937 | 0,35231 |
| Madiun | 1977,78 | 2114,84 | 2266,73 | 2443,2 | 2640,37 | 186866 | 170964 | 171784 | 172421 | 201088 | 0,00675 | 0,00665 | 0,00669 | 0,00684 | 0,00557 |
| Total | 61699,1 | 65454,7 | 70028,6 | 74971,7 | 79844,5 | 9465375 | 8502127 | 8542046 | 8576945 | 8959416 | 0,24026 | 0,24736 | 0,25011 | 0,25127 | 0,25354 |
| Provinsi | 313946 | 334156 | 357872 | 383591 | 409977 | 37236149 | 37565706 | 37840657 | 38106590 | 38363195 | | | | | |
| Tw | 0,04722 | 0,04845 | 0,04894 | 0,04911 | 0,04938 | 0,021962 | -0,01229 | -0,012143 | 0,011982 | -0,01536 | Tb | | | | |
| Koridor Timur | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | | |
| Bondowoso | 2978,91 | 3146,98 | 3341,96 | 3557,68 | 3780,57 | 151434 | 736772 | 741460 | 745948 | 761980 | 0,03765 | -0,0097 | -0,0097 | -0,0098 | -0,0091 |
| Situbondo | 3330,42 | 3522,06 | 3744,41 | 3989,29 | 4263,53 | 641870 | 647619 | 652523 | 656691 | 670337 | -0,004 | -0,0025 | -0,0026 | -0,0027 | -0,0018 |
| Probolinggo | 6358,56 | 6752,16 | 7172,49 | 7642,07 | 8144,55 | 1125061 | 1096244 | 1106436 | 1115267 | 1069805 | -0,0019 | 0,00346 | 0,00301 | 0,00264 | 0,00839 |
| Lumajang | 6013,67 | 6369,9 | 6768,52 | 7203,53 | 7672,42 | 1104532 | 1006458 | 1010865 | 1014575 | 1094578 | -0,0042 | 0,00496 | 0,00485 | 0,00469 | 0,0028 |
| Jember | 10891,6 | 11550,6 | 12359,5 | 13251 | 14165,9 | 2250014 | 2332726 | 2348552 | 2362179 | 2587188 | -0,0208 | -0,0187 | -0,0185 | -0,0182 | -0,023 |
| Banyuwangi | 10370,3 | 11015,2 | 11788,7 | 12638,5 | 13511,7 | 1684045 | 1556078 | 1562851 | 1568898 | 1653602 | 0,00607 | 0,02065 | 0,02133 | 0,02193 | 0,0216 |
| Kota | | | | | | | | | | | | | | | |
| Probolinggo | 1905,23 | 2021,83 | 2154,85 | 2303,4 | 2460,22 | 233165 | 217062 | 219862 | 222413 | 224235 | 0,00671 | 0,00922 | 0,00908 | 0,00896 | 0,00976 |
| Total | 41848,7 | 44378,7 | 47330,4 | 50585,5 | 53998,9 | 7190121 | 7592959 | 7642549 | 7685971 | 8061725 | 0,01952 | 0,00741 | 0,00744 | 0,00747 | 0,00869 |

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| Provinsi | 313946 | 334156 | 357872 | 383591 | 409977 | 37236149 | 37565706 | 37840657 | 38106590 | 38363195 | | | | | |
| Tw | 0,0026 | 0,00098 | 0,00098 | 0,00099 | 0,00114 | 0,021454 | -0,024223 | -0,024317 | 0,024336 | -0,02672 | Tb | | | | |
| Koridor Utara | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | | | | |
| Ngawi | 2942,6 | 3121,82 | 3313,43 | 3537,2 | 3784,07 | 882376 | 817765 | 818457 | 818871 | 879343 | -0,009 | -0,0092 | -0,0091 | -0,0089 | -0,0097 |
| Bojonegoro | 7267,53 | 8128,23 | 8785,11 | 9379,58 | 9876,91 | 1330316 | 1209973 | 1214518 | 1218457 | 1269682 | 0,01973 | 0,02637 | 0,02802 | 0,02856 | 0,02745 |
| Tuban | 7972,83 | 8468,92 | 9072,28 | 9650,28 | 10328,7 | 1200997 | 1118464 | 1125679 | 1131892 | 1157889 | 0,03987 | 0,03856 | 0,03898 | 0,03885 | 0,04147 |
| Lamongan | 5792,1 | 6191,07 | 6625,82 | 7098,17 | 7588,27 | 1473610 | 1179059 | 1186721 | 1193725 | 1336587 | -0,0066 | 0,0034 | 0,00357 | 0,00402 | -0,0005 |
| Bangkalan | 3269,71 | 3447,58 | 3658,62 | 3896,49 | 4142,78 | 972608 | 906761 | 917374 | 927433 | 1049549 | -0,0097 | -0,0103 | -0,0106 | -0,0108 | -0,0139 |
| Sampang | 2759,77 | 2907,2 | 3082,74 | 3271,5 | 3459,43 | 816411 | 877772 | 891293 | 904314 | 817910 | -0,008 | -0,0131 | -0,0134 | -0,0138 | -0,0094 |
| Pamekasan | 2054,2 | 2172,4 | 2307,31 | 2453,15 | 2607,1 | 828412 | 795918 | 807828 | 818662 | 788611 | -0,0135 | -0,0144 | -0,0146 | -0,0148 | -0,0129 |
| Sumenep | 4975,23 | 5255,88 | 5584,05 | 5937,68 | 6319,87 | 1040214 | 1042312 | 1048423 | 1053640 | 1114139 | 0,00575 | 0,00056 | 0,00032 | 0,0003 | -0,0005 |
| Total | 37034 | 39693,1 | 42429,4 | 45224,1 | 48107,2 | 8544944 | 7948024 | 8010293 | 8066994 | 8413710 | 0,01843 | 0,022 | 0,0231 | 0,02356 | 0,02211 |
| Provinsi | 313946 | 334156 | 357872 | 383591 | 409977 | 37236149 | 37565706 | 37840657 | 38106590 | 38363195 | | | | | |
| Tw | 0,00217 | 0,00261 | 0,00274 | 0,00278 | 0,00259 | 0,034091 | -0,02978 | -0,029848 | 0,029971 | -0,03187 | Tb | | | | |

| Tw | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Koridor Utara-Selatan | 0,048051 | 0,058383 | 0,05898 | 0,059584 | 0,060866 |
| Koridor Barat Daya | 0,047217 | 0,048452 | 0,048942 | 0,049109 | 0,049378 |
| Koridor Timur | 0,002602 | 0,000984 | 0,000984 | 0,000985 | 0,001144 |
| Koridor Utara | 0,002174 | 0,002613 | 0,002739 | 0,002778 | 0,002594 |
| Tw Jawa Timur | 0,100044 | 0,110433 | 0,111644 | 0,112457 | 0,113983 |
| Tb | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Koridor Utara-Selatan | 0,108015 | 0,104399 | 0,104039 | 0,104118 | 0,109415 |
| Koridor Barat Daya | -0,02196 | -0,01229 | -0,01214 | -0,01198 | -0,01536 |
| Koridor Timur | -0,02145 | -0,02422 | -0,02432 | -0,02434 | -0,02672 |
| Koridor Utara | -0,03409 | -0,02978 | -0,02985 | -0,02997 | -0,03187 |
| Tb Jawa Timur | 0,030508 | 0,038105 | 0,037731 | 0,03783 | 0,035458 |

4. Lampiran 4

Perhitungan Indeks Williamson

| Koridor Utara-Selatan | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kabupaten | Yi 2009 | Yi 2010 | Yi 2011 | Yi 2012 | Yi 2013 | fi/n 2009 | fi/n 2010 | fi/n 2011 | fi/n 2012 | fi/n 2013 |
| Gresik | 0,012871733 | 0,014304876 | 0,015119418 | 0,016007397 | 0,016967259 | 0,0324049 | 0,0314073 | 0,0316525 | 0,0318884 | 0,0314508 |
| Pasuruan | 0,00431485 | 0,004489973 | 0,004754832 | 0,005051259 | 0,005383218 | 0,0387079 | 0,0403575 | 0,0404574 | 0,0405445 | 0,0397064 |
| Sidoarjo | 0,012947574 | 0,013474968 | 0,01409421 | 0,014796862 | 0,017711442 | 0,0499388 | 0,0518054 | 0,0525185 | 0,0532069 | 0,0464248 |
| Mojoketo | 0,00778011 | 0,007706221 | 0,008146372 | 0,008636214 | 0,00901555 | 0,0248316 | 0,0273621 | 0,0274809 | 0,0275923 | 0,0275701 |
| Malang | 0,007602713 | 0,0059598 | 0,006331414 | 0,006749341 | 0,00737209 | 0,0471061 | 0,0652729 | 0,0653152 | 0,0653595 | 0,0622653 |
| Blitar | 0,004269785 | 0,005122846 | 0,005421581 | 0,00574181 | 0,005783851 | 0,0329712 | 0,0297955 | 0,029693 | 0,029605 | 0,0304486 |
| Kota | | | | | | | | | | |
| Surabaya | 0,027435376 | 0,031758905 | 0,033912785 | 0,036293033 | 0,038919922 | 0,0780388 | 0,0737921 | 0,0737318 | 0,0736187 | 0,0719016 |
| Pasuruan | 0,005291245 | 0,005998593 | 0,006307473 | 0,006652951 | 0,006607994 | 0,0052171 | 0,0049701 | 0,0049835 | 0,0049942 | 0,0052268 |
| Mojoketo | 0,009457431 | 0,010220307 | 0,010770612 | 0,011429131 | 0,011257738 | 0,0031962 | 0,0032072 | 0,0032145 | 0,0032205 | 0,0034089 |
| Blitar | 0,007026429 | 0,0074731 | 0,007884552 | 0,008342078 | 0,008310038 | 0,0034462 | 0,0035213 | 0,0035288 | 0,003536 | 0,003691 |
| Malang | 0,016114346 | 0,017122523 | 0,018143568 | 0,019371726 | 0,021510771 | 0,0214148 | 0,0218867 | 0,0219382 | 0,0219453 | 0,0206903 |
| Batu | 0,00715585 | 0,007530549 | 0,008034341 | 0,008598769 | 0,009225675 | 0,0048593 | 0,0050747 | 0,0050976 | 0,005119 | 0,005037 |
| Total | 0,122267444 | 0,131162662 | 0,138921159 | 0,147670571 | 0,15806555 | 0,342133 | 0,3584528 | 0,3596119 | 0,3606301 | 0,3478216 |
| Y | 313946,41 | 334155,72 | 357871,83 | 383591,25 | 409976,92 | | | | | |
| $\sum(Y_i - \bar{y})^2 \cdot F_i/n$ | 33721409399 | 40024820018 | 46056262790 | 53063885655 | 58462184604 | | | | | |
| IW | 0,584921167 | 0,59870901 | 0,599676228 | 0,600524641 | 0,5897638 | | | | | |
| Koridor Barat Daya | | | | | | | | | | |
| Kabupaten | Yi 2009 | Yi 2010 | Yi 2011 | Yi 2012 | Yi 2013 | fi/n 2009 | fi/n 2010 | fi/n 2011 | fi/n 2012 | fi/n 2013 |
| Jombang | 0,004432347 | 0,005262178 | 0,005584153 | 0,005938352 | 0,005830199 | 0,0351162 | 0,0320841 | 0,0320389 | 0,0319965 | 0,0338453 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kediri | 0,004786999 | 0,005090827 | 0,005371226 | 0,005713537 | 0,006430157 | 0,0392664 | 0,0400186 | 0,0399551 | 0,039895 | 0,0368422 |
| Trenggalek | 0,003624602 | 0,004546679 | 0,004823858 | 0,005126901 | 0,00519371 | 0,0208125 | 0,0179954 | 0,0179116 | 0,0178403 | 0,0182509 |
| Tulungagung | 0,006565379 | 0,007907718 | 0,008386623 | 0,008922357 | 0,008907659 | 0,0292391 | 0,0264206 | 0,0263748 | 0,0263347 | 0,0274453 |
| Pacitan | 0,002654428 | 0,002862404 | 0,003046279 | 0,003243631 | 0,003218358 | 0,0142928 | 0,0144324 | 0,014349 | 0,0142799 | 0,0148884 |
| Ponorogo | 0,003123641 | 0,003894697 | 0,004130261 | 0,004394029 | 0,004393703 | 0,0263171 | 0,0228216 | 0,0226717 | 0,0225376 | 0,0232395 |
| Nganjuk | 0,004034582 | 0,00520318 | 0,005512745 | 0,005858569 | 0,006014315 | 0,0322182 | 0,0271376 | 0,0270393 | 0,0269497 | 0,0273371 |
| Madiun | 0,004082731 | 0,004637947 | 0,004919404 | 0,00522047 | 0,005205632 | 0,0185422 | 0,0176717 | 0,0175859 | 0,0175117 | 0,0182265 |
| Magetan | 0,004445289 | 0,005272499 | 0,005592501 | 0,005946838 | 0,005833201 | 0,0181602 | 0,0165554 | 0,0164358 | 0,0163265 | 0,0173242 |
| Kota | | | | | | | | | | |
| Kediri | 0,065598564 | 0,081812914 | 0,087385747 | 0,093139152 | 0,09698061 | 0,0082543 | 0,0071646 | 0,0071815 | 0,0071921 | 0,007174 |
| Madiun | 0,010583948 | 0,01237009 | 0,013195234 | 0,014169968 | 0,013130421 | 0,0048782 | 0,0045619 | 0,0045468 | 0,0045311 | 0,0051561 |
| Total | 0,11393251 | 0,138861132 | 0,147948031 | 0,157673803 | 0,161137966 | 0,2470972 | 0,226864 | 0,2260901 | 0,225395 | 0,2297296 |
| Y | 313946,41 | 334155,72 | 357871,83 | 383591,25 | 409976,92 | | | | | |
| $\Sigma(Y_i - y) \cdot 2 \cdot F_i/n$ | 24354460020 | 25331623443 | 28955844832 | 33165100809 | 38613163647 | | | | | |
| IW | 0,497088517 | 0,476302227 | 0,475489144 | 0,474757647 | 0,479300944 | | | | | |
| Koridor Timur | | | | | | | | | | |
| Kabupaten | Yi 2009 | Yi 2010 | Yi 2011 | Yi 2012 | Yi 2013 | fi/n 2009 | fi/n 2010 | fi/n 2011 | fi/n 2012 | fi/n 2013 |
| Bondowoso | 0,019671342 | 0,004271308 | 0,004507269 | 0,00476934 | 0,004961508 | 0,0039532 | 0,0196594 | 0,0196249 | 0,0196029 | 0,019538 |
| Situbondo | 0,005188621 | 0,005438475 | 0,005738357 | 0,006074836 | 0,006360278 | 0,0167563 | 0,0172806 | 0,0172709 | 0,0172573 | 0,0171882 |
| Probolinggo | 0,005651747 | 0,006159359 | 0,006482517 | 0,006852234 | 0,007613116 | 0,0293701 | 0,0292513 | 0,029285 | 0,0293083 | 0,027431 |
| Lumajang | 0,005444541 | 0,006329027 | 0,00669577 | 0,007100047 | 0,007009478 | 0,0288342 | 0,0268555 | 0,0267555 | 0,0266622 | 0,0280662 |
| Jember | 0,004840685 | 0,004951525 | 0,005262613 | 0,005609643 | 0,005475404 | 0,0587375 | 0,0622446 | 0,0621613 | 0,0620761 | 0,0663384 |
| Banyuwangi | 0,006157965 | 0,007078823 | 0,007543042 | 0,008055673 | 0,008171077 | 0,0439626 | 0,0415211 | 0,0413654 | 0,0412293 | 0,0424002 |
| Kota | | | | | | | | | | |
| Probolinggo | 0,005651747 | 0,006159359 | 0,006482517 | 0,006852234 | 0,007613116 | 0,0293701 | 0,0292513 | 0,029285 | 0,0293083 | 0,027431 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total | 0,052606648 | 0,040387875 | 0,042712085 | 0,045314006 | 0,047203979 | 0,2109841 | 0,2260639 | 0,2257481 | 0,2254444 | 0,2283931 |
| Y | 313946,41 | 334155,72 | 357871,83 | 383591,25 | 409976,92 | | | | | |
| $\Sigma(Y_i - y)2.F_i/n$ | 20795080682 | 25242296669 | 28912055424 | 33172389776 | 38388554639 | | | | | |
| IW | 0,459329971 | 0,475461694 | 0,475129471 | 0,474809815 | 0,477904887 | | | | | |
| Koridor Utara | | | | | | | | | | |
| Kabupaten | Yi 2009 | Yi 2010 | Yi 2011 | Yi 2012 | Yi 2013 | fi/n 2009 | fi/n 2010 | fi/n 2011 | fi/n 2012 | fi/n 2013 |
| Ngawi | 0,003333486 | 0,003817503 | 0,004048386 | 0,004319606 | 0,004303292 | 0,0230348 | 0,0218206 | 0,0216628 | 0,0215193 | 0,0225474 |
| Bojonegoro | 0,00546301 | 0,006717695 | 0,007233413 | 0,007697916 | 0,007779042 | 0,0347284 | 0,032286 | 0,0321458 | 0,03202 | 0,0325561 |
| Tuban | 0,00663851 | 0,00757192 | 0,008059385 | 0,008525796 | 0,008920302 | 0,0313525 | 0,0298442 | 0,0297944 | 0,0297452 | 0,0296896 |
| Lamongan | 0,003930552 | 0,005250857 | 0,005583301 | 0,005946236 | 0,005677348 | 0,0384691 | 0,0314611 | 0,03141 | 0,0313701 | 0,0342716 |
| Bangkalan | 0,003361796 | 0,003802082 | 0,003988144 | 0,004201371 | 0,0039472 | 0,0253903 | 0,0241953 | 0,024281 | 0,0243722 | 0,0269116 |
| Sampang | 0,003380368 | 0,003312022 | 0,003458728 | 0,003617659 | 0,004229597 | 0,0213127 | 0,0234218 | 0,0235907 | 0,0237646 | 0,0209721 |
| Pamekasan | 0,002479684 | 0,002729427 | 0,00285619 | 0,002996536 | 0,003305939 | 0,021626 | 0,0212376 | 0,0213815 | 0,0215138 | 0,0202209 |
| Sumenep | 0,004782891 | 0,005042521 | 0,005326142 | 0,005635397 | 0,005672425 | 0,0271552 | 0,0278122 | 0,0277496 | 0,0276888 | 0,0285678 |
| Total | 0,03337167 | 0,038244027 | 0,040553688 | 0,042940517 | 0,043835147 | 0,223069 | 0,2120788 | 0,2120157 | 0,2119939 | 0,2157371 |
| Y | 313946,41 | 334155,72 | 357871,83 | 383591,25 | 409976,92 | | | | | |
| $\Sigma(Y_i - y)2.F_i/n$ | 21986197464 | 23680718052 | 27153323733 | 31193254624 | 36261308440 | | | | | |
| IW | 0,472301735 | 0,46052004 | 0,460451598 | 0,460427922 | 0,464474983 | | | | | |

| Indeks Williamson | | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Koridor | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Koridor Utara-Selatan | 0,584921 | 0,598709 | 0,599676 | 0,600525 | 0,589764 |
| Koridor Barat Daya | 0,497089 | 0,476302 | 0,475489 | 0,474758 | 0,479301 |
| Koridor Timur | 0,45933 | 0,475462 | 0,475129 | 0,47481 | 0,477905 |
| Koridor Utara | 0,472302 | 0,46052 | 0,460452 | 0,460428 | 0,464475 |
| IW Jawa Timur | 0,279354 | 0,271647 | 0,271536 | 0,271328 | 0,268145 |

5. Lampiran 5

Perhitungan Indeks Herfindahl

| PDRB | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Koridor Utara-Selatan | | | | | |
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Gresik | 15977,85 | 16837,44 | 18081,04 | 19424,16 | 20811,65 |
| Pasuruan | 6397,87 | 6790,94 | 7267,98 | 7793,27 | 8336,15 |
| Sidoarjo | 24768,32 | 26161,61 | 27966,21 | 29958,88 | 32067,61 |
| Mojoketo | 7400,48 | 7902,29 | 8458,15 | 9067,74 | 9693,79 |
| Malang | 13718,8 | 14578,97 | 15624,1 | 16786,42 | 17901,92 |
| Blitar | 5392,76 | 5720,37 | 6082,19 | 6468,47 | 6868,26 |
| Kota | | | | | |
| Surabaya | 82014,71 | 87828,84 | 94471,05 | 101671,63 | 109137,3 |
| Pasuruan | 1057,45 | 1117,31 | 1187,59 | 1264,36 | 1347 |
| Mojoketo | 1157,93 | 1228,44 | 1308,08 | 1400,64 | 1496,66 |
| Blitar | 927,58 | 986,21 | 1051,2 | 1122,46 | 1196,23 |
| Malang | 13218,92 | 14044,63 | 15038,46 | 16176,98 | 17357,45 |
| Batu | 1331,99 | 1432,19 | 1547,39 | 1674,98 | 1812,31 |
| Total | 173364,66 | 184629,24 | 198083,44 | 212809,99 | 228026,33 |
| Provinsi | 313946,41 | 334155,72 | 357871,83 | 383591,25 | 409976,92 |
| HHI | 0,552211 | 0,5525246 | 0,5535039 | 0,5547832 | 0,5561931 |
| Koridor Barat Daya | | | | | |
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Jombang | 5962,26 | 6327,28 | 6759,5 | 7230,3 | 7695,63 |
| Kediri | 7200,36 | 7635,06 | 8108,22 | 8673,84 | 9239,1 |
| Trenggalek | 2889,71 | 3066,33 | 3264,44 | 3480,53 | 3696,8 |
| Tulungagung | 7353,5 | 7829,89 | 8357,11 | 8941,21 | 9534,42 |
| Pacitan | 1453,31 | 1548,22 | 1651,47 | 1762,56 | 1868,72 |
| Ponorogo | 3148,98 | 3331,06 | 3537,87 | 3768,42 | 3982,18 |
| Nganjuk | 4979,32 | 5291,79 | 5631,76 | 6008,05 | 6412,12 |
| Madiun | 2899,89 | 3071,61 | 3268,56 | 3478,78 | 3700,33 |
| Magetan | 3092,37 | 3271,28 | 3472,77 | 3694,61 | 3941,15 |
| Kota | | | | | |
| Kediri | 20741,61 | 21967,34 | 23710,2 | 25490,23 | 27133,72 |
| Madiun | 1977,78 | 2114,84 | 2266,73 | 2443,2 | 2640,37 |
| Total | 61699,09 | 65454,7 | 70028,63 | 74971,73 | 79844,54 |
| Provinsi | 313946,41 | 334155,72 | 357871,83 | 383591,25 | 409976,92 |
| HHI | 0,1965275 | 0,1958808 | 0,1956808 | 0,1954469 | 0,1947537 |
| Koridor Timur | | | | | |
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bondowoso | 2978,91 | 3146,98 | 3341,96 | 3557,68 | 3780,57 |
| Situbondo | 3330,42 | 3522,06 | 3744,41 | 3989,29 | 4263,53 |
| Probolinggo | 6358,56 | 6752,16 | 7172,49 | 7642,07 | 8144,55 |
| Lumajang | 6013,67 | 6369,9 | 6768,52 | 7203,53 | 7672,42 |
| Jember | 10891,61 | 11550,55 | 12359,52 | 13250,98 | 14165,9 |
| Banyuwangi | 10370,29 | 11015,2 | 11788,65 | 12638,53 | 13511,71 |
| Kota | | | | | |
| Probolinggo | 1905,23 | 2021,83 | 2154,85 | 2303,4 | 2460,22 |
| Total | 41848,69 | 44378,68 | 47330,4 | 50585,48 | 53998,9 |
| Provinsi | 313946,41 | 334155,72 | 357871,83 | 383591,25 | 409976,92 |
| HHI | 0,1332988 | 0,1328084 | 0,1322552 | 0,1318734 | 0,131712 |
| Koridor Utara | | | | | |
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Ngawi | 2942,6 | 3121,82 | 3313,43 | 3537,2 | 3784,07 |
| Bojonegoro | 7267,53 | 8128,23 | 8785,11 | 9379,58 | 9876,91 |
| Tuban | 7972,83 | 8468,92 | 9072,28 | 9650,28 | 10328,72 |
| Lamongan | 5792,1 | 6191,07 | 6625,82 | 7098,17 | 7588,27 |
| Bangkalan | 3269,71 | 3447,58 | 3658,62 | 3896,49 | 4142,78 |
| Sampang | 2759,77 | 2907,2 | 3082,74 | 3271,5 | 3459,43 |
| Pamekasan | 2054,2 | 2172,4 | 2307,31 | 2453,15 | 2607,1 |
| Sumenep | 4975,23 | 5255,88 | 5584,05 | 5937,68 | 6319,87 |
| Total | 37033,97 | 39693,1 | 42429,36 | 45224,05 | 48107,15 |
| Provinsi | 313946,41 | 334155,72 | 357871,83 | 383591,25 | 409976,92 |
| HHI | 0,1179627 | 0,1187862 | 0,1185602 | 0,1178965 | 0,1173411 |

| Indek Herfindahl | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| Koridor | 2009 | % | 2010 | % | 2011 | % | 2012 | % | 2013 | % |
| Koridor Utara-Selatan | 0,552210997 | 55,22 | 0,552524554 | 55,25 | 0,5535039 | 55,35 | 0,554783223 | 55,48 | 0,55619309 | 55,62 |
| Koridor Barat Daya | 0,196527458 | 19,65 | 0,195880831 | 19,59 | 0,1956808 | 19,57 | 0,195446924 | 19,54 | 0,194753744 | 19,48 |
| Koridor Timur | 0,133298833 | 13,33 | 0,13280838 | 13,28 | 0,1322552 | 13,23 | 0,131873394 | 13,19 | 0,131712049 | 13,17 |
| Koridor Utara Jawa Timur | 0,117962712 | 11,80 | 0,118786235 | 11,88 | 0,1185602 | 11,86 | 0,117896459 | 11,79 | 0,117341118 | 11,73 |
| Jawa Timur | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |

6. Lampiran 6

Perhitungan Indeks Krugman

| Koridor Utara-Selatan | | | | | | Koridor Barat Daya | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|-------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Gresik | 15977,85 | 16837,44 | 18081,04 | 19424,16 | 20811,65 | Jombang | 5962,26 | 6327,28 | 6759,5 | 7230,3 | 7695,63 |
| Pasuruan | 6397,87 | 6790,94 | 7267,98 | 7793,27 | 8336,15 | Kediri | 7200,36 | 7635,06 | 8108,22 | 8673,84 | 9239,1 |
| Sidoarjo | 24768,32 | 26161,61 | 27966,21 | 29958,88 | 32067,61 | Trenggalek | 2889,71 | 3066,33 | 3264,44 | 3480,53 | 3696,8 |
| Mojoketo | 7400,48 | 7902,29 | 8458,15 | 9067,74 | 9693,79 | Tulungagung | 7353,5 | 7829,89 | 8357,11 | 8941,21 | 9534,42 |
| Malang | 13718,8 | 14578,97 | 15624,1 | 16786,42 | 17901,92 | Pacitan | 1453,31 | 1548,22 | 1651,47 | 1762,56 | 1868,72 |
| Blitar | 5392,76 | 5720,37 | 6082,19 | 6468,47 | 6868,26 | Ponorogo | 3148,98 | 3331,06 | 3537,87 | 3768,42 | 3982,18 |
| Kota | | | | | | Nganjuk | 4979,32 | 5291,79 | 5631,76 | 6008,05 | 6412,12 |
| Surabaya | 82014,71 | 87828,84 | 94471,05 | 101671,6 | 109137,3 | Madiun | 2899,89 | 3071,61 | 3268,56 | 3478,78 | 3700,33 |
| Pasuruan | 1057,45 | 1117,31 | 1187,59 | 1264,36 | 1347 | Magetan | 3092,37 | 3271,28 | 3472,77 | 3694,61 | 3941,15 |
| Mojoketo | 1157,93 | 1228,44 | 1308,08 | 1400,64 | 1496,66 | Kota | | | | | |
| Blitar | 927,58 | 986,21 | 1051,2 | 1122,46 | 1196,23 | Kediri | 20741,61 | 21967,34 | 23710,2 | 25490,23 | 27133,72 |
| Malang | 13218,92 | 14044,63 | 15038,46 | 16176,98 | 17357,45 | Madiun | 1977,78 | 2114,84 | 2266,73 | 2443,2 | 2640,37 |
| Batu | 1331,99 | 1432,19 | 1547,39 | 1674,98 | 1812,31 | Total | 61699,09 | 65454,7 | 70028,63 | 74971,73 | 79844,54 |
| Total | 173364,66 | 184629,24 | 198083,44 | 212810 | 228026,3 | Provinsi | 313946,41 | 334155,72 | 357871,83 | 383591,25 | 409976,92 |
| Provinsi | 313946,41 | 334155,72 | 357871,83 | 383591,3 | 409976,9 | Kik | -0,6069451 | -0,6082383 | -0,6086385 | -0,6091062 | -0,6104925 |
| Kik | 0,10442199 | 0,10504911 | 0,107007724 | 0,109566 | 0,112386 | | | | | | |

| Koridor Timur | | | | | | Koridor Utara | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Kabupaten | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Bondowoso | 2978,91 | 3146,98 | 3341,96 | 3557,68 | 3780,57 | Ngawi | 2942,6 | 3121,82 | 3313,43 | 3537,2 | 3784,07 |
| Situbondo | 3330,42 | 3522,06 | 3744,41 | 3989,29 | 4263,53 | Bojonegoro | 7267,53 | 8128,23 | 8785,11 | 9379,58 | 9876,91 |
| Probolinggo | 6358,56 | 6752,16 | 7172,49 | 7642,07 | 8144,55 | Tuban | 7972,83 | 8468,92 | 9072,28 | 9650,28 | 10328,72 |
| Lumajang | 6013,67 | 6369,9 | 6768,52 | 7203,53 | 7672,42 | Lamongan | 5792,1 | 6191,07 | 6625,82 | 7098,17 | 7588,27 |
| Jember | 10891,61 | 11550,55 | 12359,52 | 13250,98 | 14165,9 | Bangkalan | 3269,71 | 3447,58 | 3658,62 | 3896,49 | 4142,78 |
| Banyuwangi | 10370,29 | 11015,2 | 11788,65 | 12638,53 | 13511,71 | Sampang | 2759,77 | 2907,2 | 3082,74 | 3271,5 | 3459,43 |
| Kota | | | | | | Pamekasan | 2054,2 | 2172,4 | 2307,31 | 2453,15 | 2607,1 |
| Probolinggo | 1905,23 | 2021,83 | 2154,85 | 2303,4 | 2460,22 | Sumenep | 4975,23 | 5255,88 | 5584,05 | 5937,68 | 6319,87 |
| Total | 41848,69 | 44378,68 | 47330,4 | 50585,48 | 53998,9 | Total | 37033,97 | 39693,1 | 42429,36 | 45224,05 | 48107,15 |
| Provinsi | 313946,41 | 334155,72 | 357871,83 | 383591,25 | 409976,92 | Provinsi | 313946,41 | 334155,72 | 357871,83 | 383591,25 | 409976,92 |
| Kik | -0,7334023 | -0,7343832 | -0,7354897 | -0,7362532 | -0,7365759 | Kik | -0,7640746 | -0,7624275 | -0,7628796 | -0,7642071 | -0,7653178 |

| Koridor | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| Koridor Utara-Selatan | 0,104422 | 0,1050491 | 0,1070077 | 0,1095664 | 0,1123862 |
| Koridor Barat Daya | - | -0,6039523 | 0,6043146 | -0,6047396 | -0,606072 |
| Koridor Timur | 0,7291596 | -0,7300972 | 0,7311658 | -0,7318866 | -0,7321554 |
| Koridor Utara | 0,7598318 | -0,7581415 | 0,7585557 | -0,7598405 | -0,7608972 |
| Rata-rata | -0,496818 | -0,4967855 | 0,4967571 | -0,4967251 | -0,4966846 |